

**FENOMENA SAUDAGAR KE POLITISI  
( STUDI KASUS ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN WAJO )**

**The phenomena Merchant to Politicians  
(Study cases legislators of Wajo )**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD NELDY SURADIN**

**E411 06 063**



**Skripsi Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Derajat  
Kesarjanaan pada Jurusan Sosiologi**

**JURUSAN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL : FENOMENA SAUDAGAR KE POLITISI**  
**( STUDI KASUS ANGGOTA DPRD**  
**KABUPATEN WAJO )**  
**MAHASISWA : MUHAMMAD NELDY SURADIN**  
**STAMBUK : E411 06 063**  
**FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / SOSIOLOGI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II setelah  
dipertahankan oleh panitia Ujian Skripsi Pada tanggal 31 juli 2013

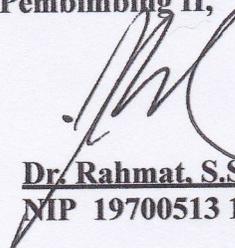
**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**



**Dr. H. M. Darwis, MA.DPS**  
**NIP 19610709 198601 1 002**

**Pembimbing II,**



**Dr. Rahmat, S.Sos. M.Si.**  
**NIP 19700513 199702 1 002**

**Mengetahui/Menyetujui**  
**Ketua Jurusan Sosiologi,**



**Dr. H. M. Darwis, MA, DPS**  
**NIP 19610709 198601 1 002**

**LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim Evaluasi Skripsi pada Jurusan  
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD NELDY SURADIN**  
**NIM : E411 06 063**  
**JUDUL : FENOMENA SAUDAGAR KE POLITISI ( STUDI KASUS**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO )**

Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2013

Tempat : Ruang Ujian Jurusan Sosiologi Unhas

**TIM EVALUASI SKRIPSI**

**Ketua : Prof.Dr.Hj. Dwia Aries Tina NK., MA (.....)**

**Sekretaris : Drs. Suparman Abdullah, Msi (.....)**

**Anggota : Dr. H. M. Darwis, MA, DPS (.....)**

**: Dr. Rahmat Muhammad, M.Si (.....)**

**: Drs.. Mansyur Radjab, M.Si (.....)**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

NAMA : MUHAMMAD NELDY SURADIN

NIM : E411 06 063

JUDUL : FENOMENA SAUDAGAR KE POLITISI ( STUDI KASUS  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO )

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Juli 2013

Yang memberi pernyataan,

Muhammad Neldy Suradin

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Ilmu dan agama selalu sepakat tetapi ilmu dan iman selalu bertengkar (Khalil Gibran)”*

*Jika tidak denganmu, aku akan menangis, tetapi kau tetap saja tidak bersamaku. Kenyataanya saat ini aku baik-baik saja. Aku teringat seorang penyair pernah berkata bahwa suaramu adalah gesekan bambu yang menyembunyikan kedalaman bahasa alam dan panoramanya setiap waktu orang-orang bertamasya mematahkan dahan-dahan. Membikin jalan baru, jalan baru itu adalah ilmu yang telah kalian berikan padaku. Huruf-huruf itu saling berkelahi berebut untuk disebutkan namanya, namun selembar kertas ini tidak mampu menampung semuanya.*

Karya ini saya persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan selama di Sosiologi, sahabat-sahabat terdekat penulis dan kepada orang yang dekat di hati, terima kasih karena telah mengambil satu tempat di hati dan menjadi penyemangat hidup.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Nikmat, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : “Fenomena Saudagar ke Politisi (Studi Kasus Anggota DPRD Kabupaten Wajo). Skripsi ini disusun sebagai tugas dan syarat terselesaikannya tugas akhir pada Universitas Hasanuddin guna meraih gelar Sarjana Sosiologi. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pembimbing Bapak Dr. H. M. Darwis, MA.DPS dan juga Selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin dan juga Bapak Rahmat Muhammad, S.Sos., M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas semua pengertian, waktu dan kesabarannya yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam penulisan ini.
2. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah melimpahkan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Kepada Ayahandaku Drs. Alimuddin, M.Si dan Ibundaku Hj. Suriyati S.Pd yang selalu menyebut nama penulis dalam doa-doanya dan semua pengorbanannya selama ini.

4. Kepada semua saudaraku yang telah memberikan Support dan terima kasih kepada Adikku Muhammad Zaldi Suradin yang telah memberikan juga masukan dalam proses penulisan.
5. Teman temanku angkatan 2006 Sosiologi. Terima kasih atas cerita-cerita dan kebersamaan selama di jurusan Sosiologi.
6. Semua pihak yang turut mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan kiranya dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan penulis dan juga yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT menilai usaha ini sebagai ibadah, membimbing kita dalam cahaya kebenarannya, dan senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya kepada kita semua sebagai hambaNya yang bertaqwa. *Amin yaa rabbal alamin.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu*

Makassar, 31 Juli 2013

Muhammad Neldy Suradin

## **ABSTRAK**

Muhammad Neldy Suradin, E411 06 063. Fenomena Saudagar ke Politisi ( Studi Riwayat Hidup Anggota DPRD Kab. Wajo) ( *Dibimbing Oleh H.M Darwis, dan Rahmat Muhammad*)

Dewasa ini orientasi para pedagang untuk turut aktif dalam bidang politik menjadi banyak perhatian bagi para pelaku politik. Orientasi yang dimaksud adalah keinginan seseorang untuk berpartisipasi politik dalam hal ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Bentuk partisipasi politik pedagang ini dimotifasi oleh keinginan mereka untuk duduk dipemerintahan sebagai pemegang kebijakan dan keputusan. Dengan duduk dipemerintahan, hal tersebut dapat mengangkat derajat sosial atau status mereka dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, serta dihubungkan dengan perumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa aktor penyebab orientasi politik pedagang Bugis-Wajo terdiri dari faktor internal yaitu watak orang Bugis Wajo yang selalu menginginkan kebebasan dan hal tersebut diperkuat oleh nilai-nilai budaya untuk saling mengingatkan dan berusaha/kerja keras, motivasi sosial mereka seperti keinginan meningkatkan status sosial mereka, keinginan untuk membangun daerah dan sebagai penyambung aspirasi masyarakat khususnya pedagang serta meningkatkan pendapatan. Sedangkan faktor eksternal seperti perubahan iklim politik menjadi lebih terbuka atau demokratisasi dan pengaruh partai politik di kabupaten Wajo

*Kata Kunci : Pedagang, Politik, Fenomena*

## ABSTRAC

Muhammad Neldy Suradin, E411 06 063. *phenomenon Merchant to Politicians*  
(Study cases legislators of Wajo) (Superve by. HM Darwis, and Rahmat Muhammad)

This adult oriented traders to participate actively in politics to be a lot of attention to the orientation of political actors in question is a person's desire to participate in politics is a member of the national parliament (legislature) forms of political participation this merchant dimotifasi by their desire to sit in government as policy makers, and decision. By sitting in the government, it can raise the degree of their social or status in society.

Based on the research and discussion that has been mentioned earlier, as well as problems associated with the formulation of the research, it can be concluded that the factors causing political orientation-Wajo Bugis traders consists of internal factors, namely the nature of the Bugis Wajo who always wanted freedom and it is reinforced by the values of culture and try to remind each other / hard work, motivation as a desire to improve their social their social status, the desire to build up the area and the people, especially merchants connecting aspirations and increase revenue. While external factors such as climate change or politics become more open and democratic political from district Wajo

*Keywords: Merchants, Political Phenomena*

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Wajo.....	38
Tabel II	Persentase Partisipasi Penduduk kabupaten Wajo Pada pemilihan Kabupaten Wajo .....	39
Tabel III	Komposisi anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2004 – 2009 dan 2009 -2014 Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin.....	43
Tabel IV	Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Wajo 2009-2014 berdasarkan Fraksi dan Jenis Kelamin .....	43
Tabel V	Keadaan Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Wajo 2009-2014.....	44
Tabel VI	Jenis Kelamin Informan .....	45
Tabel VII	Keadaan Umur Informan .....	46
Tabel VIII	Keadaan Tingkat Pendidikan Informan .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	I. Skema Kerangka Pikir.....	28
--------	------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Peta Kabupaten Wajo .....	88
Lampiran II. Dokumentasi Kegiatan .....	89
Lampiran III. Pedoman Wawancara .....	92
Lampiran IV. Identitas Informan .....	96

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRAC .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Fenomena.....	7
B. Teori Sosiologi yang terkait dengan Transformasi Sosio-Kultural.....	8
1. Teori Perubahan Sosial .....	8
2. Interaksi Sosial .....	12
3. Mobilitas Sosial .....	13
4. Teori Motif Sosial .....	15
5. Teori Stratifikasi Sosial.....	16
6. Partisipasi Politik .....	19
7. Budaya Politik .....	21

	8. Pedagang Bugis Wajo .....	23
	C. Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	29
	B. Lokasi Penelitian.....	29
	C. Defenisi Operasional .....	29
	D. Jenis Data .....	30
	E. Populasi dan Sampel .....	31
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran dan Lokasi Penelitian .....	34
	1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo.....	34
	2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Kabupaten Wajo .....	40
	B. Karakteristik Informan .....	45
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	48
	1. Penyebab Orientasi Politik Pedagang Bugis Wajo .....	48
	2. Bagaimana Bentuk Transformasi Sosio-Kultural Pedagang Bugis Wajo .....	58
	3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Sosio – Kultural .....	67
	B. Pembahasan .....	70
	1. Penyebab Orientasi Pedagang Bugis Wajo .....	70
	2. Bentuk Transformasi Sosio-Kultural Pedagang Bugis Wajo .....	77
	3. Faktor Penyebab Transformasi Sosio-Kultura Pedagang Bugis Wajo.....	82
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia bukan sebuah hal yang baru untuk dibahas, melainkan studi demokrasi telah menjadi sebuah diskursus yang penting pada disiplin ilmu-ilmu sosial. Setelah runtuhnya Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi, sistem demokrasi tersebut memberi ruang dan harapan besar bagi rakyat serta mengembalikan kepercayaan dan perasaan seseorang terhadap sistem politik serta struktur politik yang ada. Pada sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat dan berorganisasi serta berhak menentukan wakil-wakil mereka yang duduk di pemerintahan baik itu di eksekutif maupun di legislatif melalui Pemilihan Umum (PEMILU). Hal ini sesuai dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan "kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", berbeda dengan sebelumnya dimana "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". (Tangga Pustaka: 2009)

Perubahan UUD tersebut membuka luas keikutsertaan setiap warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak

memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992-140-141). Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari partisipasi warga negara dalam organisasi politik, ikut serta dalam diskusi-diskusi politik, pemberian suara dalam PEMILU sampai pada menduduki jabatan-jabatan politis pada lingkup kajian ilmu politik, partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis partai politik, pejabat partai politik. Jadi, semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi

Dewasa ini orientasi para pedagang untuk turut aktif dalam bidang politik menjadi banyak perhatian bagi para pelaku politik. Orientasi yang dimaksud adalah keinginan seseorang untuk berpartisipasi politik dalam hal ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Bentuk partisipasi politik pedagang ini dimotifasi oleh keinginan mereka untuk duduk dipemerintahan sebagai pemegang kebijakan dan keputusan. Dengan duduk dipemerintahan, hal tersebut dapat mengangkat derajat sosial atau status mereka dalam masyarakat.

Pada sistem stratifikasi masyarakat dijelaskan secara umum bahwa kelas pedagang berada pada lapisan dibawah dibanding dengan kelas elit ekonomi politik (penguasa dan tuan tanah). Walaupun sebahagian diantar?

pedagang yang masih berada di kelas ekonomi bawah dan sebagian pula dari mereka ada yang lebih kaya dari kelas pemerintah, meskipun prestise mereka tetap saja rendah. Dengan menyadari statusnya yang rendah tersebut, banyak pedagang yang berusaha meningkatkan statusnya menyamai kelas pemerintah atau pemegang kebijakan dengan jalan bergabung menjadi anggota pada organisasi politik atau partai politik (Parpol). Partai politik merupakan suatu lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara sosial maupun ekonomi, moril maupun materil. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

Keikutsertaan para pedagang termasuk pedagang Bugis-Wajo dalam konteks politik sedikit atau banyak, cepat atau lambat tentu pada prosesnya akan terjadi suatu bentuk transformasi baik pada sistem sosial maupun nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat. Bentuk-bentuk perubahannya pun bermacam-macam, dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, stratifikasi, interaksi sosial, perilaku sosial, tradisi atau kebiasaan, dan nilai-nilai kultural lainnya.

Sehubungan orientasi politik pedagang Bugis-Wajo tersebut beberapa literatur sejarah menyatakan bahwa sejak dulu orang Bugis-Wajo piawai dalam berdagang baik dalam maupun luar negeri. Selain itu orang Bugis-Wajo memiliki sistem pemerintahan yang memang mengacu pada sistem

demokratis (kebebasan). Pada Abad XV 'To Wajoe' (orang Bugis-Wajo) memiliki sistem pemerintahan demokratis yang dalam artian untuk memilih pemimpin atau raja (*Arung Matoa Wajo*) mereka berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah) Tradisi politik demokratis tersebut ditandai dengan susunan pemerintahan Kerajaan Wajo yang memiliki dewan yang mirip dengan kekuasaan parlemen. Hal tersebut diperkuat dengan hadirnya konsep oleh nilai-nilai kultur yang diyakini dalam masyarakat yakni "*Maradeka to Wajoe, najajiang alena maradeka, taniaemi ata, naia to makketenae maradeka maneng, ade assamaturusenami napopuang*" (Orang-orang Wajo itu merdeka sejak dilahirkan, hanya negeri mereka yang abadi, sepenuhnya negeri mereka semua, hanya hukum adat yang lahir dari kehendak bersama mereka yang dipertuan oleh mereka).

Berdasarkan pada fenomena-fenomena sosio-kultural pedagang Bugis-Wajo tersebut, maka masalah utama yang ingin diteliti dalam penelitian adalah bagaimana fenomenologi yang terjadi pada pedagang khususnya pedagang Bugis-Wajo yang memiliki orientasi menjadi politisi (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Adapun sebagai dasar pertimbangan penulis dalam memilih wilayah Kabupaten Wajo sebagai sasaran lokasi penelitian adalah mengingat bahwa mayoritas yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) di wilayah Kabupaten Wajo memiliki *background* pedagang bahkan hal tersebut menjadi salah satu trend di komunitas pedagang di Kabupaten Wajo

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa hal yang melatar belakangi judul dari penulisan ini maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Apa yang menyebabkan Pedagang Bugis-Wajo berorientasi pada bidang politik?
2. Bagaimana bentuk transformasi sosio-kultural pedagang Bugis Wajo yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya transformasi sosio-kultural pedagang Bugis Wajo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Mengungkapkan, menjelaskan dan menganalisis alasan rasional tentang faktor penyebab orientasi politik pedagang Bugis Wajo
2. Menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk transformasi sosio-kultural pedagang Bugis Wajo yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wajo
3. Untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penyebab transformasi sosio-kultural pada pedagang Bugis Wajo menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wajo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

##### **1. Implikasi teoritis**

- a. Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori ilmu sosial, khususnya pada kajian sosiologi politik
- b. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang transformasi sosio-kultural yang terfokus dengan studi orientasi politik pedagang

##### **2. Implikasi praktis**

- a. Sebagai salah satu bahan masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka membangun hubungan strategis dengan pedagang Bugis-Wajo demi terwujudnya pemerintahan demokratis
- b. Sebagai salah satu bahan masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan kepada pedagang Bugis-Wajo yang memiliki orientasi politik
- c. Sebagai salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada partai politik (Parpol) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perekrut (pengkader) serta pemberi pendidikan politik pada masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan petunjuk dan sebagai bahan acuan bagi aktivitas ilmiah terutama dalam rangka penelitian lebih lanjut

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Fenomena**

Istilah fenomena berasal dari bahasa Yunani: *Phainestai* yang berarti “menunjukkan” dan “Menampakkan diri sendiri. Yakni dengan menampakkan realita sesuai dengan dirinya sendiri . dan tugas utama menurut Husserl adalah menjalin keterkaitan antara manusia dengan realitas. Keterkaitan ini mendorong manusia untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada dengan pengalaman langsung dengan realitas tersebut. Sehingga pengalaman tersebut akan memberikan sebuah penafsiran, yaitu esensi dari realitas tersebut. Husserl menggunakan istilah fenomenologi untuk menunjukkan apa yang nampak dalam kesadaran kita dengan membiarkannya termanifestasi apa adanya tanpa memasukkan kategori pikiran kita, dan membiarkan fenomena tersebut berjalan apa adanya. Karena pikiran itu hanya bersifat teoritis yang terikat oleh pengalaman indrawi yang bersifat relatif subyektif sedangkan fenomena adalah realitas yang bersifat obyektif.

Dengan membiarkan fenomena berjalan dengan sendirinya, maka apa yang terlihat adalah perbuatan-perbuatan kesadaran yang mana berhubungan dengan obyek-obyek serta pendirian-pendirian yang diamati itu, sehingga dengan melepaskan segala pikiran tentang fenomena tersebut dan dari segala yang bukan esensi dari fenomena, maka akan terciptalah pengertian murni. Jadi fenomenologi menjembatani manusia untuk mengungkapkan noumena

dari fenomena.

Dalam peta tradisi teori ilmu sosial terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat.

Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara *praxis* sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. Namun demikian implikasi secara teknis dan *praxis* dalam melakukan pengamatan aktor bukanlah esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif.

## **B. Teori Sosiologi yang terkait dengan Fenomenologi Sosio-Kultural**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori besar (*grand theory*) sosial yang relevan dengan kajian transformasi sosio-kultural untuk melandasi studi pustaka, yakni:

### **1. Teori Perubahan Sosial**

Konsep perubahan sosial dari dulu memang menjadi studi yang menarik untuk dipelajari karena perubahan sosial merupakan sebuah fenomena dalam masyarakat yang mengkaji tentang usaha manusia untuk merubah struktur sosialnya. Dalam proses terjadi suatu perubahan sosial maka pada saat itu pula terjadi suatu transformasi nilai-nilai dalam masyarakat. Proses perubahan sosial tersebut merupakan bentuk peradaban

manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologi, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia.

Menurut Wilber Moore (dalam Louer, 2003) perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan struktur sosial adalah pola perilaku dan interaksi sosial sedangkan menurut Soekanto persepsinya memaparkan perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi sosial susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat kekuasaan dan wewenang interaksi sosial. (Soekanto, 2003)

Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Suiyanto (2007:63) dalam Adijah menyatakan bahwa bentuk perubahan sosial yang terjadi secara organik (transformasi) dan rekayasa sosial (reformasi). Dalam rekayasa sosial (reformasi) masyarakat ditempatkan sebagai "obyek" perubahan, oleh karenanya mereka diarahkan, dikontrol, direncanakan serta dikonstruksi oleh kalangan ilmuwan, birokrat dan bahkan koordinator program LSM yang berperan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan dalam perubahan sosial organik (transformasi), perubahan sosial dimaksudkan sebagai proses yang melibatkan masyarakat sebagai "subyek" untuk perubahan sistem dan struktur menuju ke sistem yang lebih adil. Proses transformasi berwatak subyektif, memihak, tidak netral dan populis.

Menurut Farley (Sztompka: 2004) memberikan gambaran tentang perubahan sosial yang mengacu pada variasi hubungan antara individu,

kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu Dengan mengacu pada kajian beberapa defenisi perubahan sosial di atas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu tidak dapat dihindari, maka dari itu upaya untuk mempersiapkan diri, menghadapi dan mengelola perubahan yang akan terjadi serta perubahan sosial merupakan suatu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial, yang mana struktur sosial dan fungsi sosial berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya baik pada bidang sosial budaya, ekonomi dan politik

Adapun faktor-faktor penyebab perubahan sosial juga dapat dilihat pada peran pergerakan sosial, pertarungan kekuasaan antara kelompok-kelompok dominan dan kelompok-kelompok yang lebih lemah, peran partai politik tertentu Sementara dilain pihak Arnold M. Rose (Adijah, 2009: 24) yakni :

- a. Kumulasi yang progresif dari pada penemuan-penemuan dibidang teknologi. Hal ini disebabkan bahwa teknologi yang memiliki daya berkembang yang kuat dapat memberikan suatu perubahan pada masyarakat.
- b. Konflik antara budaya: Apabila dua kebudayaan berhubungan sehingga proses peniruan dan paksaan akan terjadi serta terbukanya alam pikiran seseorang untuk terjadinya hal-hal yang baru.
- c. Gerakan Sosial (*social movement*). Dalam hal ini manusia baik individu maupun kelompok senangtiasa mengalami gerak sosial baik

dalam bentuk mendatar ataupun horizontal maupun dalam bentuk vertikal/tegak. Gerak sosial dalam bentuk mendatar yakni gerakan yang berhubungan dengan perpindahan ruang geografi atau migrasi sosial (*social migration*), sedangkan gerak sosial dalam bentuk tegak yakni gerakan masyarakat yang terjadi pada status sosial seseorang dari rendah ke tinggi atau sebaliknya misalnya dari status pedagang menjadi pemerintah.

Selain itu penyebab perubahan sosial yang lain dikemukakan oleh Siagian dan Sedarmayanti (Adijah, 2009.26) adalah.

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat
- b. Perkembangan teknologi terjadi dengan kepesatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya.
- c. Terjadinya proses demokratisasi dalam bidang politik, supremasi hukum dan ekonomi yang mengemuka dalam bentuk tuntutan yang makin kuat dikalangan masyarakat akan berbagai haknya
- d. Berkat perkembangan dan terobosan teknologi yang melahirkan revolusi, transportasi, komunikasi, informasi, dunia semakin kecil sehingga disebut sebagai desa yang global
- e. Perubahan geopolitik terjadi dengan berakhirnya perang dingin sehingga menimbulkan optimisme baru dikalangan umat manusia bahwa dunia tidak akan pernah lagi dilanda perang dunia.

## 2. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan hubungan, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok sosial yang lain. Interaksi sosial terjadi ketika dua atau lebih orang, yang saling bertemu dengan saling menyapa. Interaksi sosial juga terjadi pada kelompok atau partai politik yang bertarung untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial. Menurut Abdusyani (1992: 153) interaksi sosial adalah sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak yaitu antara individu dengan individu atau kelompok lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Namun dalam perkembangan teori tentang interaksi memunculkan teori baru yakni interaksi simbolik. Interaksi simbolik dalam pandangannya menyatakan bahwa perilaku manusia harus di pahami dari sudut pandang subyektif. Dimana teoritis interaksi simbolik ini memandang bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Inti pada teori ini adalah mengungkap bagaimana cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang akan mereka sampaikan dalam proses komunikasi dengan sesama.

Menurut Herbert Blumer dalam George Ritzer (2009:52), Interaksi simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling

mendefenisikan tindakannya

### 3. Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial (*.social mobility*) berasal dari kata *move re* (latin) yang berarti memindahkan/berpindah Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan orang atau kelompok dari satu strata sosial ke starata sosial yang lain dalam sebuah struktur sosial Menurut Kimbal Young (Soekanto, 2006) mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial Dalam masyarakat mobilitas sosial secara individu terjadi bersamaan dengan mobilitas sosial masyarakat Secara umum mobilitas sosial terdiri dari beberapa jenis yakni

- a. Mobilitas sosial vertikal mobilitas sosial yang berarti perpindahan (arah gerak) dari bawah ke atas atau *social climbing* yang, dan dari atas ke bawah (*social sinking*),Perpindahan struktur individu dari kedudukan rendah beralih ke kedudukan yang lebih tinggi dan biasanya gerakan sosial tersebut disebabkan karena faktor- faktor ekonomi, politik serta pekerjaan seseorang serta gerakan-gerakan sosial tersebut terjadi pada lembaga ekonomi, organisasi politik, lembaga keagamaan dan sebagainya.
- b. Mobilitas sosial horizontal adalah perubahan kedudukan seseorang dapat maju atau mundur tetapi masih pada Japisan sosial yang sama. Misalnya, seseorang melakukan perpindahan penduduk (urbanisasi, transmigrasi dan sebagainya)

Dalam gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain baik dari atas ke bawah atau sebaliknya. Maka dari itu gerak sosial vertikal memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Gerak sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama, yaitu
  - Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah kedalam kedudukan yang lebih tinggi, kedudukan mana yang telah ada
  - Pembentukan suatu kelompok baru, yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut
- b. Gerak sosial vertikal yang menurun mempunyai dua bentuk utama, yaitu:
  - Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya,
  - Turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan.

Proses Gerak sosial vertikal menurut Pitirim A Sorokin, secara umum mempunyai saluran-saluran terpenting dalam masyarakat (*social circulation*). Saluran terpenting yang dimaksud adalah angkatan bersenjata, sekolah, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi sampai pada organisasi politik seperti partai politik (Parpol) dapat memberi peluang dengan ikut menjadi anggota. Hal ini dapat dipakai sebagai saluran

sosial untuk menaikkan kedudukan ke kedudukan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kekuasaan atau wewenang

#### 4. Teori motif sosial

Sebelum kita membahas tentang motif sosial maka terlebih dahulu kita mengerti apa itu motif adalah sesuatu yang ada dalam diri individu yang menggerakkan atau mengakibatkan sehingga individu berbuat sesuatu atau suatu dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Setelah mengetahui apa sebenarnya motif, maka berikut ini merupakan beberapa definisi tentang motif sosial (Maharudin, 2005) yakni

- a. Lindgren (1973) berpendapat bahwa motif sosial yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting.
- b. Barkowits (1973) mengemukakan bahwa motif yang mendasari aktifitas individu dalam beraksi terhadap orang lain
- c. Max Crimon dan Messick (1976) menyatakan bahwa seseorang dikatakan menunjukkan motif sosial, jika ia dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain,
- d. Heckhausen (1980) berpendapat bahwa motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain.

Menurut David C. Mc. Lelland (Adijah, 2009) motif sosial merupakan sesuatu yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan dan dari itu David C Mc Lelland

membagi dalam tiga kategori motif sosial, yakni :

- a. Kebutuhan untuk berprestasi atau berkarya lebih baik (*Need for Achievement*). Dalam diri setiap manusia tentunya ingin diakui dalam masyarakat maka dari itu tidak sedikit orang mengeluarkan energinya atau kekuatannya untuk melakukan atau bekerja dan berkarya lebih baik dari orang lain.
- b. Kebutuhan untuk bersahabat atau berafiliasi (*Need for Affiliation*). Sebagai makhluk sosial kebutuhan kepada manusia lain sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Motif sosial bersahabat dan berafiliasi menjadi sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan modernisasi yang mengharuskan memperbanyak jaringan-jaringan sosial yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam masyarakat.
- c. Kebutuhan untuk berkuasa (*Need for Power*). Dalam setiap wilayah tentunya terdapat penguasaan baik dalam suatu perusahaan, instansi atau lembaga-lembaga sosial bahkan pada suatu negara. Hal inilah membuat manusia memiliki suatu motif untuk menjadi penguasa atau orang yang berkuasa.

## **5. Teori Stratifikasi Sosial**

Kata stratifikasi berasal dari stratum atau strata yang berarti lapisan. Jadi stratifikasi sosial (*social stratification*) menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Lapisan-lapisan yang dimaksud mulai dari yang

paling bawah hingga paling atas dan mengarah pada pembagian anggota kelompok masyarakat ke dalam tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik tiap-tiap anggota kelompok.(History Of Woman: 2010)

Pada sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Namun, ada pula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Beberapa alasan yang biasa dipakai dalam terbentuknya lapisan masyarakat tersebut adalah kepandaian, tingkat umur, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Dalam kehidupan masyarakat stratifikasi memiliki dua bentuk, yaitu: 1) bentuk kelas adalah bentuk yang menunjukkan pembagian masyarakat yang didasarkan atas posisi ekonomi dalam masyarakat, tanpa memperhatikan apakah mereka menyadari posisinya atau tidak, 2) bentuk status yaitu bentuk lapisan yang didasari oleh tingkat posisi seseorang atau kelompok.

Pada konsep kelas dalam masyarakat menurut Karl Marx menjelaskan bahwa pada masyarakat terdiri dari dua kelas yakni lapisan masyarakat dari kelompok kelas proletariat/pekerja (kelompok miskin) dan kelas borjuis (kelompok kaya). Karl Marx menyatakan bahwa dalam masyarakat diperlukan perjuangan kelas proletariat melawan kaum borjuis dalam usaha mengawasi sumber-sumber produksi. Sedangkan Max Weber dalam konsepnya lebih menunjukkan perhatiannya terhadap tipe lain yang lebih berasal dari pengakuan terhadap status yang mungkin akan

mematahkan struktur kelas. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial lain, didasarkan alas kelompok penguasa (*power group*) dan kelompok yang dikuasai (*non power group*) yang berarti lapisan masyarakat diukur oleh kekuatan ekonomi, kekuasaan dan kehormatan. Selain itu dalam pandangan Weber tentang stratifikasi berdasarkan kelas sebagai berikut: 1) kelas kepemilikan, yaitu mereka-mereka yang memiliki benda berharga, 2) kelas perdagangan, kelas yang berdasarkan keahlian dan segi pendapatan, 3) kelas sosial, adalah gaya hidup seseorang (Giddens 1986)

Namun, berbeda dengan konsep stratifikasi sosial Talcott Parson menyatakan bahwa stratifikasi dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam mengatasi keterbatasan mereka. Selanjutnya dalam penjelasannya bahwa jika setiap orang diperlakukan sama dan memiliki derajat yang sama, peranan pemimpin yang diperlukan oleh suatu masyarakat untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan sosial tidak ada lagi. Maka dengan adanya stratifikasi, individu melakukan peran pemimpin dan untuk itu memperoleh ganjaran berupa hak istimewa dan prestise.

Selanjutnya Pelras (2006:5) menyatakan bahwa ciri khas orang Bugis adalah berkarakter keras dan menjunjung tinggi kehormatan. Selanjutnya Pelras menambahkan bahwa prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan tetap merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan

roda kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Hal tersebut dapat **dilihat** pada konsep stratifikasi sosial pada orang Bugis-Wajo yakni; 1) *To Maparenta* yakni pemerintah, 2) *To Panrita* yakni ahli agama atau tokoh spritual, 3) *Tan Acca* yakni cendikiavvan atau orang pintar, 4) *Tan Sugi mapanre NQ satiiasa* yakni orang kaya, pengusaha yang terampil dan ceketan, 5) *Tan Warani mapata'e* yakni orang pemberani atau pahlawan yang selalu waspada (Adijah: 2009: 76)

## **6. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik di Indonesia khususnya partisipasi politik aktif dan konfensional, memiliki dinamika atau pasang surut yang unik dan menarik. Salah satunya dapat dilihat pada partisipasi politik dalam pemilu yang merupakan salah satu bentuk partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Menurut konsep Rush dan Althoff (Miriam Budi Arjo 1994:183) perbedaan bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan sebagai berikut: 1) Voting atau pemberian Suara, 2) Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, 3) Partisipasi dalam rapat umum, 4) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*), 5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*), 6) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, 7) Keanggotaan

aktif suatu organisasi politik, 7) Mencari jabatan politik atau administrasi, 8) Menduduki jabatan politik atau administrasi.

Lebih lanjut Menurut Kevin R. Hardwic dalam Meriam Budiarjo partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Salah satu cara warga negara dalam mewujudkan keinginan dan kepentingan politiknya tersebut adalah dengan bergabung di salah satu partai politik. Menurut perspektif sosiologi politik, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintah atau negara sedangkan dalam ilmu politik, istilah partai politik bisa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Setiap keberadaan lembaga politik, termasuk partai politik, tentunya memiliki fungsi-fungsi politik. Hanya saja, fungsi partai politik akan berbeda-beda satu sama lain, khususnya dalam hal pengejawantahannya, apabila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Secara umum fungsi utama partai politik, di manapun adanya, adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Menurut Miriam Budiarjo (1998:163) berkenaan dengan beragamnya fungsi partai politik, misalnya menuturkan bahwa fungsi partai politik dalam negara

demokratis dan negara berkembang, yakni: 1) Sebagai sarana komunikasi politik, 2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik, 3) Partai politik sebagai sarana rekrutment politik; 3) Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).

## 7. Budaya politik

Menurut Sidney Verba budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi tempat dilakukannya tindakan politik sedangkan Gabriel A Almond dan G. Bingham Powell mendetenisikan bahwa budaya politik adalah berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dan populasi Selanjutnya Almond dan Verba menjelaskan beberapa klasifikasi atau tipe-tipe budaya politik yang berkembang pada sebuah negara sesuai orientasi politik yakni :

- a. Tipe budaya *parokial*. frekuensi orientasi tentang proses apriori terhadap persoalan-persoalan politik atau bahkan lebih ekstremnya "apolitik",
- b. Tipe kebudayaan Subjek : frekuensi orientasi yang tinggi sistem yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipasi yang aktif, mendekati nol.

- c. Tipe kebudayaan participant yakni suatu bentuk kultur yang anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif

Kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Pola orientasi politik mengandung beberapa komponen sebagai berikut

- a. Orientasi kognitif : berisikan tentang kesadaran, pengetahuan, dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta *input* dan *output-nya*
- b. Orientasi efektif: berisikan emosi-emosi dan perasaan terhadap sistem politik, objek, peranannya, para aktor, dan penampilannya,
- c. Orientasi evaluative : berisikan keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Selanjutnya, objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang sebagai berikut :

- a. Pada sistem, yakni sebagai suatu keseluruhan dan termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa;
- b. Pada pribadi sebagai aktor politik: isi dan kualitas, norma-norma kewajiban politik seseorang, serta isi dan kualitas kemampuan diri

setiap orang *vis a vis* sistem politik

## **8. Pedagang Bugis-Wajo**

Sebelum mengkaji tentang pedagang Bugis-Wajo maka harus dipahami batasan tentang pedagang. Pengertian pedagang adalah seorang atau lembaga yang membeli atau menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapat keuntungan (dikmenum: 2007) Secara umum pedagang dibedakan menjadi tiga:

- a. Pedagang besar/distributor atau agen tunggal, yaitu: pedagang yang membeli atau mendapat produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak atau wewenang/wilayah tertentu dari produsen, contohnya agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.
- b. Pedagang menengah/agen atau grosir yaitu: pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh pedagang grosir pakaian di Kabupaten Wajo.
- c. Pedagang eceran/pengecer atau paritel, yaitu pedagang yang menjual barang langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran di mini market.

Selain itu Dirjen pajak membagi jenis pedagang menjadi dua yaitu pedagang dan pedagang pengecer. Pengertian pedagang besar dengan pedagang pengecer adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1988, yang dimaksud dengan pedagang besar adalah pengusaha dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam usaha perdagangan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP kepada pihak manapun kecuali yang semata-mata melakukan penyerahan sebagai pedagang pengecer
- b. Seseorang digolongkan sebagai pedagang pengecer apabila Tidak bertindak sebagai penyalur kepada pedagang lainnya dari Barang Kena Pajak yang diperdagangkan,  
Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, mobil. keliling, atau dengan cara penjualan yang dilakukan kepada konsumen, atau dari rumah ke rumah, Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut,  
Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang di belinya Apabila seseorang pengusaha tidak memenuhi batasan sebagaimana tersebut diatas, maka yang bersangkutan digolongkan

Pedagang Besar (Dirjen Pajak, 2008).

Sejak zaman dahulu orang Bugis sangat piawai dalam berdagang baik di negeri sendiri sampai di luar negeri. Kemampuan berdagangnya untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan keturunannya. Kepiawaian berdagang To Wajoe (Orang Bugis-Wajo) didasari oleh kemampuannya membaca situasi dan memanfaatkan peluang usaha serta kebiasaan dari para pendahulunya (karakter sosio kultural masyarakat Wajo). Kebiasaannya “merantau” selalu diidentikkan dengan mengadu nasib di kampung orang dengan tujuan mencari penghidupan yang layak. Istilah “*merantau*” dalam ilmu kependudukan (demografi) disebut juga dengan migrasi yang berarti perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ketempat lain melampaui batas politik (negara) (Ima Kesuma 2004)

Pada konteks sejarah, merantau pada orang Bugis-Wajo dulu tidak serta merta terjadi begitu saja akan tetapi disebabkan oleh kondisi historic situasional yang seolah-olah menjadi sebuah ketiadaan pilihan untuk tetap eksis di tengah ketidakpastian politik (*political uncenteinly*). Menurut berbagai literatur sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 1070 suasana politik Kerajaan Wajo tidak kondusif di akibatkan oleh perang dengan Kerajaan Bone. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Wajo mengadakan migrasi. Kebiasaan merantau orang Bugis-Wajo dengan tujuan berdagang menjadikan orang Wajo diberi julukan oleh orang Makassar “Orang Cina-nya Bugis: atau manusia yang memiliki “jiwa

kapitalisme” (Ahmadin: 2008) Keberhasilan Wajo dalam mengelola sebuah usaha perdagangan sejak dulu telah menjadi sebuah identitas tersendiri untuk masyarakatnya. Keberhasilan tersebut di landasi oleh nilai-nilai kebudayaan Bugis yaitu *reso* atau usaha/kerja- keras serta dalam. naskah Lontara sendiri menyebutkan bahwa "*resopa temmangingi namallomo naletei pammase dewata*" (hanya kerja keras dan sungguh-sungguh yang mendapat rahmat dari dewata/yang maha kuasa), selanjutnya bagi orang yang tidak punya usaha dan menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan mendapat celaan.

Berbagai literatur sejarah pada awal abad ke 18 Pangeran Wajo yang bernama Petta La Maddukkelleng-Arung Sengkang melakukan pelayaran bersama dengan pengikutnya menuju Kerajaan Pasir atau Kalimantan Timur dengan tujuan berdagang memberi bukti bahwa proses dagang orang Wajo memang sudah di kenal pasar nasional bahkan sampai internasional Kemampuan berdagang orang Wajo dilandasi dengan kemampuan mereka untuk berbaur dengan masyarakat di daerah rantauan Orang Wajo jika dalam ditinjau aspek sosio-kultural memang memiliki prinsip hidup *Sipakatau* (saling menghargai), *Sipakalebbi* (saling memuliakan), *Sipakainge* (saling mengingatkan) Selain itu pola adaptasi yang dilakukan atau strategi berbaur adalah dengan prinsip "*Tellu Cappa*" (tiga ujung). Ujung pertama ialah ujung lidah yang dimaksudkan dengan berkomunikasi, berdiplomasi, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, Ujung kedua ialah ujung badik (keris), kemampuan ini

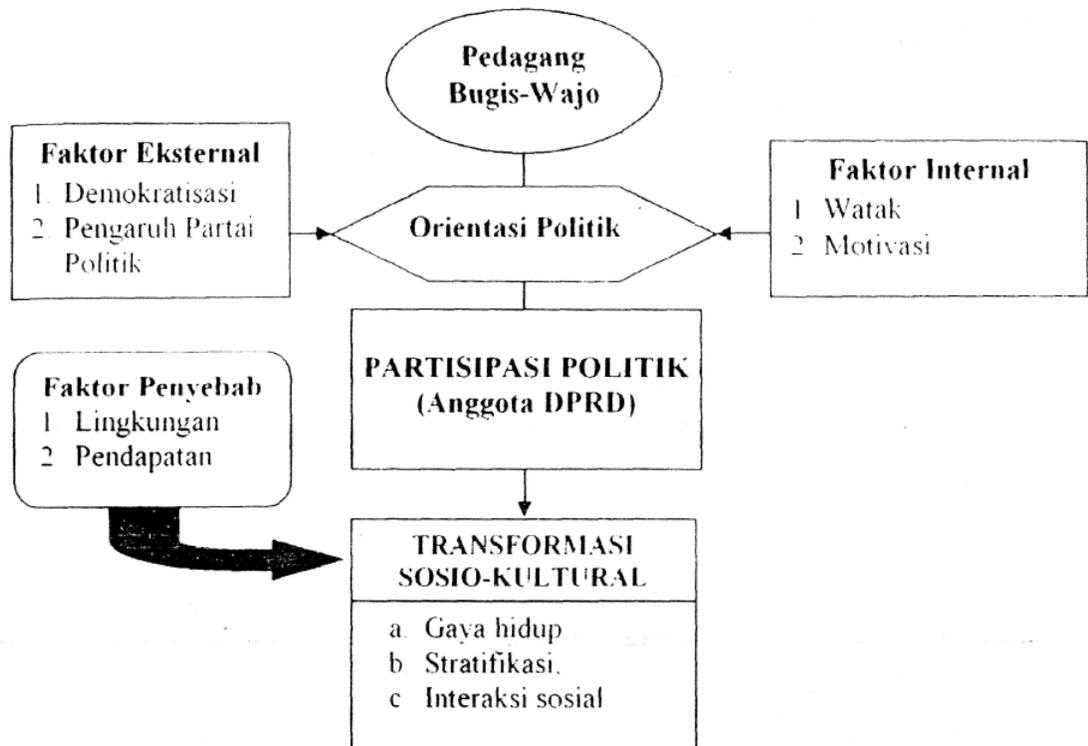
menyimbolkan dengan keberanian atau konsisten pada komitmen. Ketiga adalah ujung kemaluan, yang berarti melakukan perkawinan penduduk bangsawan demi meraih kejayaan

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir berfungsi sebagai kerangka konsep/teori untuk suatu penelitian yang menjawab/menjelaskan masalah penelitian, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis dan menarik kesimpulan. Dalam hal ini kerangka pikir merupakan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian teori dan analisis yang berkaitan dengan orientasi politik pedagang Bugis-Wajo. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi orientasi politik pedagang Bugis-Wajo tersebut yang berimplikasi pada partisipasi mereka dibidang politik seperti pada faktor internal yakni watak orang Bugis Wajo dan motivasi serta penyebab pada faktor eksternal seperti Demokratisasi dan pengaruh partai politik

Pada dasarnya setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat tentunya beriring dengan terjadinya proses transformasi baik pada nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai kulturalnya (budaya). Adapun bentuk transformasi yang terjadi pada pedagang Bugis Wajo setelah terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo adalah gaya hidup, - pola interaksi sosial, kehormatan. Faktor yang menyebabkan terjadinya proses transformasi sosio-kultural adalah lingkungan dan pendapatan.

Berikut Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



(Gambar 1)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa atau perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi, dengan menekankan pada sifat kealamiahannya sumber data sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu, dilakukan dengan naturalistik atau fenomenologis, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dan pada hasil. menggunakan analisis induktif, dan pengungkapan makna suatu peristiwa merupakan tujuan esensinya (Bogdan dan Biklen, 1998, Moleong, 2004 ).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Wajo, dengan pertimbangan bahwa kecenderungan para pedagang untuk berpartisipasi dalam bidang politik di daerah ini cukup tinggi serta ditinjau pada aspek sosio-kulturalnya Kabupaten Wajo merupakan daerah yang memiliki potensi perniagaan yang tinggi.

#### **C. Defenisi Operasional**

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap masalah yang diteliti, maka perlu dirumuskan defenisi operasional penelitian yang mempunyai batasan sebagai berikut:

1. Pedagang Bugis-Wajo dalam penelitian ini diartikan orang yang berketurunan orang Bugis-Wajo dan bermata pencaharian berdagang atau orang yang melakukan proses jual beli barang (produk) dengan konsumen
2. Politisi dalam penelitian ini diartikan sebagai orang yang terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wajo.
3. Partisipasi politik dalam penelitian ini adalah keterlibatan individu dalam bidang politik seperti menjadi pengurus partai atau menjadi anggota legislatif serta jabatan-jabatan politis lainnya
4. Orientasi politik dalam penelitian ini adalah suatu tindakan atau aktifitas yang mempengaruhi kehidupan dan berpartisipasi seseorang terhadap sistem politik dan struktur politik yang ada

#### **D. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus partai atau anggota legislatif Kabupaten Wajo yang memiliki *background* pedagang Data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan- informan dan dokumentasi sehingga dibutuhkan pedoman wawancara, perekam suara, kamera dan buku catatan. Data ini dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang bentuk-bentuk dan penyebab pedagang berorientasi yang menjadi politisi di Kabupaten Wajo.
2. Data sekunder, untuk melengkapi data primer diperoleh dengan cara pengkajian sumber bacaan yang relevan dan menggali informasi dari

instansi atau lembaga terkait, seperti partai politik di Kabupaten Wajo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai penyelenggara PEMILU dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo

#### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang memiliki partisipasi aktif di bidang politik di Kabupaten Wajo dan teknik penentuan informan melalui metode *Purposive sampling*, teknik *Purposive sampling* ini dikenal juga dengan sampling pertimbangan. *Purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. oleh karena itu, sampling ini cocok untuk studi kasus yang mana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis..

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara terbuka untuk mendapatkan informasi secara langsung dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang memiliki latar belakang pedagang
2. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data pendukung yang dilakukan dengan cara, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas yang dilakukan para politisi yang memiliki *background* pedagang

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder yang sudah tertulis maupun melalui pengambilan gambar aktifitas para politisi dari komunitas pedagang.

Kemudian untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara benar dan akurat, maka diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Menurut Moleong (2002 : 178) mengemukakan pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dapat digunakan dengan cara sebagai berikut

- a. Membandingkan data hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari informan
- b. Membandingkan hasil informasi dari orang lain secara umum dengan hasil informasi yang diungkapkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang berlatar belakang pedagang
- c. Membandingkan informasi yang diperoleh dari orang-orang yang berbeda dilingkungan aktivitas anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga, seperti di rumah, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja maupun ditempat lainnya dengan berbagai pendapat umum yang biasa dikatakan tentang anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang berlatar belakang pedagang.

- d. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan studi dokumentasi yang diperolehnya sehubungan dengan perubahan yang dialami oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

## **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan Pengamatan sangat dibutuhkan dalam pendekatan penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk menghindari data yang tidak benar yang diperoleh dari responden yang biasa jadi objek akan menutup diri terhadap fakta yang sebenarnya.

Ketekunan pengamatan bermaksud menentukan ciri - ciri dan unsur - unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut dengan rinci (Moleong 2005:329)

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

Terbentuk Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase perkembangan masyarakat yang dimulai dari sebuah perkampungan masyarakat yang bernama *Lampuhmngge* (kampung yang berada di dekat Danau Lampulung) dan daerah inilah yang menjadi sebuah asal mula terbentuknya kerajaan *Cinnotlabi*. Dalam sebuah kisah, sekitar abad ke XV mengisahkan bahwa seorang putri mahkota kerajaan Luwu yang bernama *We Taddangpalie* terpaksa disingkirkan dari kerajaannya dikarenakan mengidap penyakit kulit (kusta) yang ditakutkan akan menular. *We Taddangpalie* dihanyutkan bersama dengan para pengawalnya sampai akhirnya mereka terdampar di daerah maradeka (merdeka) yang disebut *Cinnottabi*. Putri tersebut kemudian membangun rumah disebuah pohon kayu besar yang memiliki daun rindang,' yang disebut dengan pohon *Bajo* dan dari nama pohon inilah muncul asal mula nama Wajo.

Dalam perkembangannya daerah ini menjadi makmur dan rakyat yang semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari *Tellu Kajurue* berinisiatif untuk mempersatukan daerah mereka tersebut, mereka akhirnya berkumpul di bawah pohon *Bajo* untuk membicarakan masalah pengangkatan Raja yang akan memimpin ketiga negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga raja tersebut menghasilkan perjanjian sistem pemerintahan yang akan mengatur hubungan kekuasaan antara raja, para pejabat kerajaan, serta hak-hak kebebasan rakyat

berdasarkan. yaitu adat dan hukum adat yang lahir dari persetujuan bersama antara raja, penguasa adat dan rakyat (Indar Arifm: 206) Dari pertemuan itu kemudian menyepakati bahwa *La Tenribali* (Arung Mataesso) yang juga sepupu dari raja-raja *Tellu Kajurue* yang diangkat menjadi Raja Wajo dan mendapatkan gelar *Batara Wajo* sebab beliau dalam hal memerintah sangat bijaksana dan diharapkan mampu menjadikan Kerajaan Wajo lebih berkembang dan lebih demokratis.

#### **a. Kondisi geografis wilayah penelitian**

Pada tinjauan sejarah perubahan status Kabupaten Wajo pada tahun 1957 dari kerajaan menjadi sebuah daerah yang otonom tingkat 11 dalam sistem kelembagaan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis daerah Kabupaten Wajo terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dan termasuk daerah strategis sebab memiliki kondisi wilayah yang agraris. memiliki pantai yang menghadap Teluk Bone. Ibukota Kabupaten Wajo yakni Sengkang terletak kurang lebih 250 kilometer dari Kota Makassar atau ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terletak pada 3'39 sampai dengan 4'16 lintang selatan dan 119'53 sampai dengan 120'27 bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan

Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah daratan secara administratif sekitar 2.506,19 kilometer persegi dalam presentase 4,01 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan sawah 86.777 ha (34,63%) dan lahan kering 163 842ha (65,37%) sedangkan jenis tanah sebagian besar berkategori tanah mediteran coklat dan kemerah-merahan, yang cocok untuk lahan perkebunan dan lahan tanaman pangan maka dari itu penduduk Kabupaten Wajo mayoritas bekerja pada sektor pertanian.(BPS 2012)

Secara administratif Kabupaten Wajo terbagi dalam 14 kecamatan, 48 kelurahan, dan 128 desa jadi secara keseluruhan 176 desa atau kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki daerah yang terluas adalah kecamatan keera dan yang terkecil adalah kecamatan tempe. Keadaan iklim Kabupaten Wajo tergolong iklim yang termasuk tipe B dan tipe C dengan suhu berkisar 29' c- 31,05' c. (BPS: 2012)

#### **b. Kondisi Demografi**

Kabupaten Wajo sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk asli suku Bugis. Selain penduduk asli, juga di Kabupaten Wajo didiami oleh beberapa penduduk pendatang dari berbagai daerah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan maupun dari Luar Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk pendatang yang berdiam di Kabupaten Wajo tersebut diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Kabupaten Wajo, pedagang, melanjutkan pendidikan, pegawai swasta dan sebagainya.

Menurut data administrasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2008 kondisi demografi Kabupaten Wajo memiliki penduduk sebesar 380.521 jiwa yang terdiri dari 181.210 jiwa laki-laki dan 199.311 jiwa perempuan sex rasio 91,92 persen dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesar 0,87 persen sedangkan kepadatan penduduk 152 jiwa per kilometer persegi dan 99,4 persen memeluk agama Islam atau 378.104 jiwa penduduk yang beragama Islam.(BPS: 2012)

### **c. Kondisi Sosial Ekonomi**

Pada kondisi sosial ekonomi Kabupaten Wajo dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat universal dan berlangsung secara terus menerus sepanjang kehidupan umat manusia dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini karena pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dalam rangka upaya memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan sebagai usaha sadar manusia yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Di negara kesatuan republik Indonesia pendidikan adalah merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 31 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan (hasil amandemen UUD 1945 tahun 2002).

Pada konteks perkembangan pendidikan Kabupaten Wajo dewasa ini merupakan hasil implementasi dari pelaksanaan kebijakan program pendidikan gratis yang diprogramkan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan yang dimana program tersebut memberikan pembiayaan pendidikan secara gratis pada peserta didik disetiap Kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi, secara umum bahwa tidak ada lagi penduduk Kabupaten Wajo tidak mendapatkan

pendidikan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS2012) bahwa adapun lapangan kerja penduduknya kebanyakan ada pada sektor pertanian meskipun yang menjadi ciri khas daerah ini adalah sebagai daerah memiliki potensi perniagaan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ;

label 1. Persentase penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Wajo, 2011-2012

Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	67.53	66.36	40.77	39.64	58.09	55.94
Industri	2.31	2.33	20.30	21.66	8.66	9.87
Perdagangan	12.12	11.32	27.84	27.80	17.67	17.75
Jasa	7.41	8.18	9.65	9.24	8.20	8.50
Lainnya	10.62	11.81	1.44	1.65	7.38	7.85
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>(105,676)</b>	<b>(108,12)</b>	<b>(57,653)</b>	<b>(69,072)</b>	<b>(163,329)</b>	<b>(177,193)</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012

Menurut dari data diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh penduduk kabupaten Wajo adalah pertanian yang tingkat persentasenya tahun 2012 mencapai 55.94 persen, kemudian diikuti oleh lapangan pekerjaan dibidang perdagangan sebanyak 17, 75 persen, selanjutnya industri dengan 9,87 persen, Bidang jasa 8,50 persen dan sisinya lapangan kerja yang lainnya sebanyak 7,85 persen. Tingginya tingkat usia penduduk yang bekerja di Lapangan pekerjaan bidang pertanian disebabkan oleh kondisi lahan yang masih banyak berbentuk sawah

#### d. Kondisi Politik dan keamanan

Kondisi politik dan keamanan di daerah Kabupaten Wajo sifatnya

dinamis dan terbuka. Hal ini sinergis dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokratis yang memberikan kebebasan rakyatnya dalam artian kedaulatan berada ditangan rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis tersebut diperkuat dengan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan Bupati. Pada kondisi perpolitikan Kabupaten Wajo termasuk suatu daerah yang tidak memiliki potensi konflik yang besar Hal ini disebabkan karakter masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada setiap kontes pemilihan pimpinan.

Kondisi perpolitikan Kabupaten Wajo tersebut dapat dilihat pada partisipasi penduduk di PIMILUKADA (pemilihan Bupati Wajo) tahun 2008 yang dimana menjalankan proses dengan sangat demokratis tanpa adanya kerusuhan atau konflik pada masyarakat. Berikut tabel persentase partisipasi penduduk pada pemilihan Bupati Kabupaten Wajo:

Tabel 2. Persentase partisipasi penduduk Kabupaten Wajo pada pemilihan Bupati Wajo

<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Terdaftar</b>	228,774	100%
Menggunakan Hak pilih	203,712	70,54 %
• Suara sah	199,367	69,04 %
• Suara tidak sah	4,345	1,50%
<b>Tidak menggunakan hak pilih</b>	5,062	29,46 %

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wajo merupakan suatu daerah dengan memiliki tingkat partisipasi penduduk dalam bidang politik cukup besar. Terbukti dengan pada pemilihan Bupati Tahun 2008 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 70,54 persen dan yang tidak menggunakan sebanyak 29,46 persen.

## **2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo**

Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berawal pada peralihan Kabupaten Wajo yang bertolak pada Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1957 tentang pembubaran Daerah Swatantra Bone (meliputi Bone, Soppeng dan Wajo) kemudian dibentuk tiga daerah swatantra yang setingkat yakni Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo yang diimplementasikan pada 11 maret 1957, maka khusus daerah swantara daerah Tingkat II Wajo oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Pangeran Pettarani menunjuk Pati Andi Muhammad Arsyah selaku Pejabat sementara (Pjs) Kepala Daerah Wajo untuk mengisi kekosongan pemerintahan pada masa itu dan secara bersama-sama dengan partai politik memproses serta mempercepat terbentuknya DPRD peralihan.

Namun, sebelum rampung Gubernur Sulawesi Selatan menugaskan Pati Andi Tandjong menggantikan Pati Andi Muhammad Arsyah menjadi pejabat sementara (Pjs) Kepala Daerah Wajo. Hal inilah yang mengantar terbentuknya DPRD Kabupaten Wajo yang dipilih dari berbagai unsur seperti: Unsur parpol (Masyumi, PSII, PKR), perorangan dan dari kalangan profesi lainnya dengan diketuai Syech Abdulkadir Tahir dan Wangun selaku wakil kelua. Tidak lama

kemudian karena situasi politik nasional saat itu yang menganut sistem parlementer tidak dapat dipertahankan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh presiden selaku Panglima Tertinggi membubarkan Parlemen hasil Pemilu 1955 lewat dekrit Presiden 5 Mei 1959, maka dibentuklah DPRD-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Wajo yang pertama kali diketuai oleh Andi Magga Amirullah dan wakilnya Andi Mori dari Partai NU sedangkan keanggotaannya terdiri dari unsur paipol, organisasi profesi, TNI, Kepolisian Negara, Ulama, angkatan 45 (Veteran) serta golongan lain. Selanjutnya, Andi Magga Amirullah ditarik oleh pemerintah propinsi dan beliau digantikan oleh Kapten Andi Hasanuddin Oddang sebagai Kepala Daerah Kabupaten Wajo dan Wakil Ketuanya tetap dijabat oleh Andi Mori sampai Pemilu Berikutnya pada tahun 1966.

Diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari sejumlah orang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan anggota masyarakat Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah secara yuridis mengatur pola kedudukan DPRD yang membuat kewenangan DPRD menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan kewenangan DPRD masa lalu. Adapun fungsi DPRD Kabupaten Wajo sebagai berikut: 1) fungsi legislasi merupakan suatu fungsi yang dimana DPRD berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Keseluruhan peraturan daerah (perda) dihasilkan

pemerintah daerah merupakan hasil inisiatif kemudian dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil merupakan representasi dari keinginan-keinginan masyarakat untuk pengembangan dan perbaikan daerah dimasa depan, 2) *fungsi anggaran budgeting* merupakan suatu fungsi yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah. 3) *fungsi pengawasan* adalah salah satu fungsi lembaga legislatif yang lebih mengarah pada dukungan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah Pengawasan yang dilakukan menyangkut apakah suatu kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan program, arah dan tujuan yang telah ditentukan.(Syahrir: 2008)

#### **a. Keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo Periode 2009-2014**

Berdasarkan dari pemilihan umum 2009 komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo masa bakti 2009-2014 terdiri dari 35 orang dari berbagai partai politik. Dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Wajo 29 orang berjenis kelamin Laki-laki dan 6 orang yang berjenis kelamin perempuan sedangkan pada periode 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Wajo 31 orang berjenis kelamin Laki-laki dan 4 orang yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya keanggotaan DPRD tersebut di bagi menjadi bentuk fraksi yakni 6 fraksi: fraksi GOLKAR sebanyak 4 orang, PAN sebanyak 4 orang, DEMOKRAT sebanyak 5 orang, PKNU sebanyak 5 orang, HANURA sebanyak 4 orang, dan fraksi Wajo Bersatu atau fraksi gabungan partai-partai sebanyak 13 orang. Untuk lebih memahami gambaran komposisi anggota DPRD Kabupaten Wajo dapat dilihat

pada tabel berikut :

label 3. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2004-2009 dan 2009-2014 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

No.	Partai politik	Periode 2004-2009		Priode 2009-2014	
		L	P	L	P
1.	GOLKAR	16	1	2	2
2.	PAN	5	-	3	1
3.	DEMOKRAT	-	-	3	1
4.	PKNU	-	-	3	-
5.	HANURA	-	-	3	-
6.	GERINDRA	-	-	1	-
7.	PKB	1	-	2	-
8.	PKS	3	1	2	-
9.	PPP	2	-	2	-
10.	PATRIOT	-	-	1	-
11.	PDI-P	1	1	1	1
12.	PDK	2	-	2	-
13.	PPD	-	-	1	-
14.	KEDAULATAN	-	-	-	1
15.	PPI	-	-	1	-
16.	PSI	1	-	1	-
17.	PNBK	-	-	1	-
18.	PBB	-	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>6</b>

Sumber : Sekretahat DPRD Kabupaten Wajo, 2012

Tabel 4. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Wajo 2009-2014 berdasarkan Fraksi dan Jenis Kelamin

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	GOLKAR	2	2	4
2.	PAN	3	1	4
3.	DEMOKRAT	4	1	5
4.	PKNU	5	-	5
5.	HANURA	4	-	4
6.	WAJO BERSATU	11	2	13
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo, 2012

**b. Tingkat Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Wajo Periode 2009-2014**

Pendidikan adalah sebuah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal dan pikirannya, menerapkan ilmu pengetahuan untuk menjawab problem-problem sosial, serta mencari hipotesa-hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman Pendidikan merupakan sebuah media untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa, sekaligus sebagai suatu instrumen yang akan melahirkan tenaga-tenaga (intelektual dan praktisi) serta menjadi penopang bagi perkembangan hidup masyarakat.

Pendidikan harus menjadi faktor pendorong bagi kemajuan peradaban menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan demokratis. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Wajo paling rendah yaitu SMA dan Perguruan Tinggi (PT). Berikut ini akan disajikan tabel keadaan tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Wajo

Tabel 5. Keadaan tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Wajo 2009-2014

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	16	46%
2.	Perguruan Tinggi		
	• Strata Satu	17	48%
	• Strata Dua	2	6%
	Jumlah	35	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo

Berdasarkan data yang diperoleh di atas tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 16 orang atau 46 persen, lalu pada tingkat Perguruan Tinggi khusus untuk strata satu (SI) sebanyak 17 orang atau 48 persen kemudian pada tingkat Perguruan Tinggi khusus untuk strata dua (S2) sebanyak 2 orang atau 6 persen

## **B. Karakteristik Informan**

Untuk mencapai akurasi data dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini maka diperlukan penjelasan tentang karakteristik informan yang meliputi jenis kelamin, keadaan umur, tingkat pendidikan, dan riwayat pekerjaan.

### **1. Jenis Kelamin**

Adapun sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang memiliki latar belakang pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan jenis kelamin sampel:

Tabel 6. Jenis Kelamin Informan

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen (%)</b>
1.	Laki-laki	5	83,00
2.	Perempuan	1	17,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Informan Penelitian*

Dari keseluruhan total informan, jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan informan yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan bahwa pedagang yang terpilih menjadi anggota DPRD lebih

banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan berjenis kelamin perempuan.

## 2. Keadaan umur informan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD yang terpilih memiliki usia berkisar antara 35 tahun keatas Sebagaimana yang terlihat dalam tabel keadaan umur anggota DPRD berikut ini

Tabel 7. Keadaan umur informan

No.	Keadaan Umur	Jumlah	Persentase
1.	35-40 tahun	2	33%
2.	40-45 tahun	4	67%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Informan Penelitian*

## 3. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pencarian ilmu pengetahuan untuk bergerak dari ketidaktahuan menjadi paham dan yakin akan sesuatu yang ditelaah/dipelajarinya, mengembangkan potensi lahiriah dan spiritual manusia sehingga yang tercipta dari proses pendidikan tersebut adalah manusia yang mampu mengembangkan potensi diri menjadi insan yang cerdas intelegensi dan spiritualnya yang mampu menghasilkan (produktif). bukan hanya mampu memakai/menghabiskan (konsumtif), membimbing akhlak manusia menjadi insan yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk kemaslahatan/keselamatan, kesejahteraan pribadi, bangsa, negara dan ummat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pedagang tingkat pendidikan yaitu SMA

dan perguruan tinggi. Berikut ini akan disajikan keadaan pendidikan sampel penelitian pada anggota DPRD Kabupaten Wajo.

Tabel 8. Keadaan tingkat pendidikan informan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	2	33%
2.	Perguruan Tinggi		
	• Strata Satu	3	50%
	• Strata Dua	1	17%
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Informan Penelitian*

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Wajo minimal Sekolah Menengah Pertama (SMA) dengan tingkat persentase 33 persen , perguruan tinggi (strata satu) 50 persen dan perguruan tinggi (strata dua) 17 persen. Hal ini disebabkan oleh aturan anggota DPRD yang mengharuskan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMA).

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penyebab Orientasi politik Pedagang Bugis-Wajo**

Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia dimulai pada jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan oleh rezim politik baru yaitu Orde Reformasi. Kondisi politik tersebut membawa banyak perubahan pada sistem-sistem politik yang ada termasuk pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis sampai pada format pemilihan yang berubah menjadi pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan unsur utama dari sistem demokrasi yang perlu diselenggarakan secara benar, jujur, dan adil mengingat fungsi pemilu merupakan untuk merealisasikan keinginan-keinginan rakyat untuk menduduki pemerintahan dan dapat mengontrol kebijakan baik pada jabatan administrasi maupun jabatan politik. Diketahui bahwa pada sistem demokrasi setiap orang yang berhak memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif (dewan) yang nantinya akan menyampaikan setiap aspirasi rakyat kepada pemerintahan (eksekutif) sebagai pelaksana kebijakan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis tentang orientasi politik pedagang Bugis Wajo yang berimplikasi terhadap partisipasi politik pedagang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri pedagang Bugis Wajo) sedangkan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri pedagang Bugis Wajo)

## **a. Faktor Internal**

### **1. Watak orang Bugis Wajo**

Watak yang ada pada setiap individu maupun kelompok masyarakat merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan menjadi suatu karakteristik dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Watak setiap suku atau kelompok masyarakat melahirkan pemaknaan tersendiri bahkan watak tersebut menjadi identitas mereka tak terkecuali watak yang ada pada orang Bugis Wajo yang mampu bertahan dan sampai sekarang ditengah arus perkembangan globalisasi dan modernisasi.

Diketahui bahwa dari berbagai literatur sejarah menyatakan bahwa masyarakat Bugis Wajo memiliki watak pedagang (*entrepreneur*) yang sangat kental dan telah menjadi suatu identitas tersendiri bagi orang Bugis Wajo baik di negeri sendiri (secara nasional) bahkan di luar negeri (internasional).

Selain itu orang Bugis Wajo memiliki watak yang selalu menginginkan suatu kebebasan. Semangat kebebasan (*liberal spirit*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan pilihan-pilihan hidupnya kedepan baik pada segi ekonomi, sosial budaya sampai di bidang politik seperti kebebasan dalam hal mencari nafkah, bebas dari tekanan-tekanan psikologis sampai pada kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik.

Dari semangat kebebasan tersebut berimplikasi terhadap terbentuknya suatu paradigma atau pola pikir tentang suatu keberhasilan yang mengarah

pada terciptanya suatu tindakan setiap orang Bugis Wajo. Watak yang melekat tersebut mengkrystal dan menjadi suatu nilai budaya. Adapun nilai-nilai budaya yang dimaksud yakni "*Maradeka to Wajoe, najajiang alena maradeka, tanaemi ata, naia to makketenae maradeka maneng, ade assamahirusennami napopuang*" (Orang Wajo merdeka, dan terlahir dalam kondisi sudah merdeka, hanya tanahlah yang menjadi abdi, setiap mereka yang hidup diatas tanah Wajo memiliki hak kemerdekaan, dan hanya adat turun-temurun yang telah disepakatilah yang dijadikan pengikat). Dari nilai budaya tersebut mengandung nilai-nilai tentang hak asasi manusia seperti demokratisasi atau paham kebebasan serta ketaatan pada hukum yang berlaku.

Bagi orang Bugis-Wajo nilai tentang kebebasan tersebut telah menjadi suatu pegangan dan memiliki arti penting dalam menjalani kehidupan termasuk dalam penentuan tindakan politik yang mereka jalani. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh BO, bahwa:

keinginan saya untuk terjun di dunia politik diawali karena adanya peraturan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dipilih menjadi anggota DPRD dengan syarat yang telah ditentukan. Artinya saya (pedagang) juga mempunyai hak yang sama dalam hal berpolitik karena sesungguhnya kita orang Wajo memang memiliki watak yang selalu mau bebas atau merdeka.(wawancara, 12 November 2012 )

Selanjutnya watak tentang kebebasan tersebut dipertegas oleh AA.

Berikut kutipan wawancaranya bahwa :

salah satu falsafah yang saya jadikan pegangan hidup baik dalam politik dan memang menjadi suatu watak bagi orang Wajo adalah *Maradeka To Wajo'E Adena* Napopuang (merdeka orang wajo, hukum adat yang di pertuankan). (wawancara, 12 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa watak tentang kebebasan tersebut memberikan keyakinan mereka terhadap langkah politik yang mereka pilih. Selain itu nilai kultural yang juga dipegang dalam menentukan tindakan-tindakan politik mereka adalah falsafah "Tiga S" yakni Sipakatau, Sipakalebi dan Sipakainge yang berarti saling menghargai, saling menghormati dan saling mengingatkan. Berikut kutipan wawancara dengan LH bahwa:

Dalam kehidupan ini falsafah "Tiga S" *Sipakatau, Sipakalebi dan Sipakainge* (saling menghargai, saling menghormati dan saling mengingatkan) saya jadikan suatu pegangan bahkan pada langkah politik kita. (wawancara. 13 November 2012)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keinginan pedagang ikut berpartisipasi pada bidang politik dipengaruhi oleh nilai budaya yang menganjurkan untuk saling mengingatkan, saling memberi masukan atau sebagai penyambung aspirasi demi pengembangan daerah Kabupaten Wajo. Dari nilai budaya yang tertanam dalam diri pedagang Bugis-Wajo tersebut maka semakin kuatlah keyakinannya untuk mengaktualisasikan diri dan mencoba keberuntungannya dalam kontestasi politik yang akhirnya berefek adanya orientasi politik pedagang Bugis Wajo.

Sedangkan nilai budaya yang juga berpengaruh terhadap orientasi politik pedagang Bugis Wajo adalah "*resopa temmangingngi namalomo naletei pammase dewata seuwae* " artinya hanya dengan kerja keras tak kenal lelah serta bosan yang mudah dilimpahi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa

Nilai kultural tersebut dijadikan suatu pegangan dalam hal mengejar kesejahteraan dan keberhasilan mereka dalam kehidupan. Nilai kultural ini yang juga memberikan motivasi dan keinginan untuk terjun diberbagai profesi atau pekerjaan karena mereka meyakini bahwa dengan memiliki etos kerja yang tinggi dan bersungguh-sungguh maka akan diberi jalan yang mudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mencapai keinginannya terpilih menjadi anggota DPRD di kabupaten Wajo. Berikut kutipan wawancara dengan AM tentang nilai kultural tersebut :

Dalam kehidupan sehari-hari saya meyakini falsafah dari nenek moyang kita yakni "*resopa temmangingngi namalomo naleiei pammase dewata seuwae* " karena dengan berusaha pasti kita akan mendapatkan yang kita mau termasuk dalam hal mengejar karier politik atau menjadi anggota DPRD (wawancara, 12 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa nilai kultural tentang *reso* (kerja) yang ada dan diyakini oleh pedagang Bugis Wajo telah menjadi hal yang membentuk pola pikir dan menstimulasikan tindakan pedagang Bugis Wajo dalam menjalani kehidupan usaha, karir politik dan masa depannya. Dalam artian bahwa pedagang Bugis Wajo juga memiliki orientasi untuk mendapatkan keberhasilan dalam bidang politik bukan hanya pada bidang ekonomi atau perdagangan.

## **2. Motivasi sosial**

Motivasi adalah suatu dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan yang ada dalam diri individu yang mampu menggerakkan seseorang untuk bertindak. Dalam kehidupan bermasyarakat motivasi mempunyai peranan

penting. Motivasi seseorang ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri seseorang.

Setiap manusia pasti ingin meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan hidupnya agar lebih baik dari sebelumnya. Bentuk kesejahteraan dan keberhasilan seseorang dapat dilihat berdasarkan pendapatan, kedudukan atau pengaruh yang diperoleh di masyarakat. Dari keinginan mereka itu maka dapat menrangsang diri mereka untuk menggunakan segala potensinya demi tercapainya sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan.

Menurut hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian adanya orientasi politik pedagang yang berimplikasi terhadap partisipasi mereka untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo disebabkan oleh adanya motivasi atau keinginan untuk menaikkan status sosial mereka dari pedagang menjadi pemerintah (anggota DPRD). Menurut hasil wawancara hal tersebut sesuai dengan pemaparan LH menyatakan bahwa:

keinginan saya menjadi anggota DPRD dan aktif dalam dunia politik atas dorongan diri sendiri. Adapun motivasi saya adalah dengan menjadi anggota DPRD kita dapat mengangkat status (derajat) keluarga di mata masyarakat sebab status sosial tidak lagi dilihat dari kekayaan tapi kedudukan seseorang.(wawancara 13 November 2012)

Dari hasil uraian diatas menunjukkan bahwa salah satu motivasi pedagang Bugis Wajo berorientasi politik (menjadi anggota DPRD) adalah untuk mengangkat derajat atau status sosial mereka sebab status sosial sebagai pemerintah mendapat suatu ganjaran prestise yang tinggi

dibanding dengan pedagang. Selain itu ada juga yang memiliki motivasi untuk membangun atau berpikir untuk pengembangan daerah dengan jalan menjadi penyambung aspirasi dari masyarakat khususnya aspirasi dari golongan pedagang. Berikut kutipan wawancara RL menyatakan bahwa:

keinginan saya menjadi anggota DPRD pada periode yang kedua ini adalah *pertama* selain saya memiliki keinginan untuk membangun Kab. Wajo melalui kebijakan-kebijakan yang saya usulkan di DPRD saya masih diharapkan oleh konstituen untuk menjadi wakil mereka di dewan. (wawancara 14 November 2012 )

Dari beberapa motivasi pedagang yang diungkapkan diatas membuktikan bahwa keikutsertaan mereka dalam pertarungan politik sebagai anggota DPRD bukan tanpa orientasi atau memiliki tujuan baik secara individu (pribadi) maupun demi kepentingan umum. Namun secara umum dari seluruh informan mengakui bahwa salah satu motivasi mereka juga adalah menginginkan kesejahteraan dari aspek peningkatan pendapatan. Berikut hasil wawancaranya menyatakan bahwa :

Motivasi saya adalah dengan menjadi anggota DPRD dapat meningkatkan pendapatan sebab selain usaha kami jalan seperti biasanya, kami juga jelas akan mendapatkan gaji dari negara.(wawancara 14 November 2012)

Dari semua hasil wawancara diatas hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi politik pedagang Bugis Wajo bukan tanpa sebab dan terjadi begitu saja akan tetapi orientasi mereka disebabkan oleh motivasi dari dalam diri mereka dan nilai-nilai kultural yang masih ada dan melekat kuat dalam diri setiap pedagang Bugis Wajo

## **b. Faktor Eksternal**

### **1. Keterbukaan atau Demokratisasi**

Sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan tentang faktor internal penyebab pedagang Bugis-Wajo berorientasi politik Adapun faktor eksternal atau penyebab dari luar diri pedagang Bugis Wajo berorientasi politik (menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo) adalah Keterbukaan atau demokratisasi dan pengaruh partai politik.

Kondisi perpolitikan Indonesia pasca pergantian rezim Orde Baru membuka luas ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia. Diketahui bahwa dalam masyarakat demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi baik secara individual maupun secara kelompok misalnya pada hak-hak dasar demokratis yang memberi kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis, hak untuk ikut aktif dan pasif dalam pemilihan umum.

Dengan melihat gambaran kondisi perpolitikan diatas hal tersebut berimplikasi terhadap perkembangan partisipasi politik secara nasional dan termasuk di daerah Kabupaten Wajo Fenomena peningkatan partisipasi politik pedagang dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik seperti diskusi-diskusi politik, dialog tentang politik, kampanye, bahkan menjadi aktor atau calon legislatif DPRD di Kabupaten Wajo di latar belakang oleh berbagai macam orientasi politik seperti orientasi terhadap struktur pemerintahan, orientasi pada

sistem politik dan aktivitas politik Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan AO dan AM bahwa:

awalnya keinginan saya untuk menjadi anggota DPRD karena kondisi sekarang semua warga negara berhak dan mendapat kebebasan berpolitik termasuk para pedagang berbeda pada Waktu aman Orde Baru (wawancara. 12 dan 13 November 2012)

Dari hasil wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa pengaruh perubahan iklim politik dari Orde Barn menjadi Orde Reformasi yang lebih demokratis menyebabkan orientasi politik pedagang Bugis Wajo untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo Selain itu iklim politik memposisikan pedagang sebagai salah satu komunitas yang perlu diperhitungkan baik segi pengaruh, finansial (materi) bahkan popularitas Berikut kutipan wawancara dengan RL menyatakan bahwa

kondisi perpolitikan yang demokratis sekarang baik secara lokal maupun nasional memberikan hak kepada semua warga negara termasuk pedagang yang ingin menjadi anggota DPRD sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undanii (wawancara, 14 November 2012)

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh dari informan maka dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim perpolitikan dan perubahan sistem pemilihan yang lebih terbuka (demokratis) seperti calon legislatif dipilih secara langsung berimplikasi terhadap keikutsertaan pedagang dalam konsentrasi politik.

## **2. Pengaruh partai politik**

Keberadaan partai politik pada setiap negara yang menganut paham demokratis merupakan suatu hal sangat penting Partai politik

merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintah atau negara. Partai politik adalah suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota demi memperbesar pengaruh dan agar dapat memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan serta kebijakan-kebijakan. Terkait dengan hal tersebut dari sudut pandang partai politik melihat bahwa pedagang memiliki pengaruh besar baik pada segi finansial maupun popularitas. Disisi lain pedagang menyadari bahwa keberadaan pemerintah dan partai politik memiliki pengaruh besar pada kondisi perekonomian yang nantinya dapat berdampak pada usaha mereka.

Dalam negara demokrasi partai politik pada hakikatnya merupakan suatu lembaga yang dapat mewujudkan keinginan-keinginan politik anggotanya dan kepentingan politik seseorang atau kelompok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keikutsertaan pedagang Bugis-Wajo pada pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Wajo tidak terlepas oleh pengaruh partai politik setempat. Partisipasi pedagang pada pemilihan umum (menjadi calon legislatif) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginannya untuk duduk di pemerintahan dan mengontrol kebijakan-kebijakan. Menurut hasil wawancara hal tersebut diakui oleh AO dan AA menyatakan bahwa:

awalnya keinginan saya untuk menjadi anggota DPRD karena diajak oleh pengurus partai politik untuk ikut bergabung dan itu menjelang adanya pemilihan legislatif di Wajo. (12 November 2012)

Pengaruh partai politik terhadap pedagang menjelang pemilihan anggota DPRD tersebut dipertegas oleh RL yang juga menjabat sebagai pimpinan partai di Kabupaten Wajo menyatakan bahwa

Setiap orang pasti memiliki kepentingan dalam hal politik termasuk pedagang. Untuk menjadi anggota legislatif memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti: 1) jenjang pendidikan minimal SMA. 2) pengurus partai politik dll, sedangkan variabel yang menentukan dalam pemilihan adalah: 1) memiliki pengaruh di masyarakat, 2) popularitas 3), kemampuan dana untuk mem-back up kerja-kerja politik dilapangan (wawancara, 14 November 2012)

Dari hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bahwa pengaruh partai politik terhadap pedagang terjadi sebelum pemilihan anggota DPRD. Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa partai politik merekrut pedagang sebab memiliki pengaruh dan popularitas terhadap masyarakat dan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiaya kerja-kerja politiknya agar partai mereka menjadi partai pemenang dalam pemilu.

## **2. Bagaimana bentuk transformasi sosio-kultural pedagang Bugis-Wajo**

Orientasi politik pedagang Bugis-Wajo pasca perubahan sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang berimplikasi terhadap keikutsertaan pedagang dalam pemilihan anggota DPRD di Kab. Wajo. Keikutsertaan pedagang tersebut tentunya pada prosesnya mengalami suatu proses transformasi baik pada sistem sosial maupun budaya. Adapun transformasi yang terjadi tersebut merubah gaya hidup (life style), interaksi sosial, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

### **a. Gaya hidup**

Bentuk transformasi yang terjadi pada pedagang Bugis Wajo adalah perubahan gaya hidup atau life style. Diketahui bahwa setiap masyarakat memiliki gaya hidup yang berbeda-beda tergantung dengan profesi yang mereka geluti. Hal inilah yang terjadi pada pedagang Bugis-Wajo yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo

Perubahan gaya hidup yang tercermin adalah cara berpakaian pedagang Bugis-Wajo sebelum menjadi anggota DPRD seperti pedagang yang biasanya yang dimana tidak terlalu mengikuti perkembangan mode dalam artian pedagang Bugis-Wajo menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan berdagang. Namun berbeda dengan pekerjaan sebagai anggota DPRD adalah suatu profesi yang dimana menuntut untuk selalu menunjukkan sikap kewibawaan dengan memakai pakaian yang resmi, rapi dan sopan seperti pakaian batik, pakaian safari baik dikantor juga pada acara-acara pesta atau hajatan seperti yang dialami oleh AA mengatakan :

Sewaktu saya menjalankan usaha berdagang kami menggunakan baju kaos saja karena baju tidak berpengaruh terhadap apa yang dijual contohnya ketika saya berjualan batu bata, biasa saya juga turut mengangkat batu bata jadi kalo saya memakai baju yang bagus pasti akan rusak atau kotor. Berbeda kalau saya kepesta biasanya saya mengenakan pakaian jas atau pakaian yang baru. Sedangkan setelah menjadi anggota DPRD, ke kantor mesti mengenakan pakaian yang rapi dan sopan karena telah menjadi aturan seperti mengenakan pakaian kemeja atau batik.

Menurut hasil pengamatan di lokasi penelitian, gaya berpakaian resmi, rapi dan sopan anggota DPRD tersebut menjadi suatu keharusan karena sudah menjadi suatu tata tertib yang harus diikuti di kantor DPRD Kabupaten Wajo, hal ini disebabkan oleh lingkungan anggota DPRD yang selalu berinteraksi dengan para pejabat daerah Berikut hasil wawancara dengan AM Mengatakan:

Berpakaian rapi dan sopan itu telah menjadi suatu kewajiban di kantor DPRD karena setiap waktu kita pasti akan bertemu dengan masyarakat ataupun para pejabat daerah ataupun luar daerah, dan juga terkadang ketika kita turun reses (berkunjung dengan konstituen/masyarakat) untuk menampung aspirasi mereka kita mesti mengenakan pakaian yang rapi agar dapat menunjukkan kewibawaan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa cara berpakaian pedagang Bugis-Wajo mengalami suatu transformasi setelah menjadi anggota DPRD. Perubahan pada gaya hidup pedagang tentang cara berpakaian tersebut dipengaruhi oleh lingkungan mereka bekerja dan interaksi sosial yang terjadi pada mereka.

Selain itu dalam pengamatan penulis juga melihat adanya perubahan gaya hidup berdagang yang dimana kebiasaan pedagang setiap harinya dilakukan secara teratur di pagi untuk mempersiapkan barang dagangannya. Hal ini mengalami suatu perubahan setelah menjadi anggota DPRD kebiasaan mempersiapkan barang dagangannya digantikan oleh Istri/Suami atau orang yang dipercayakan sebab setelah menjadi anggota DPRD, pedagang pada pagi hari hanya mempersiapkan kebutuhan untuk kantor atau tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya sekarang. Perubahan kebiasaan yang juga terjadi pada pagi hari beralih dengan hanya membaca koran demi menambah informasi yang kontemporer. Bagi mereka

hal tersebut sangat penting dikarenakan menjadi anggota DPRD mesti memiliki pengetahuan yang up to date sesuai dengan perkembangan baik secara nasional maupun lokal Kabupaten Wajo. Hal ini diakui oleh LH bahwa:

Perubahan gaya hidup yang terjadi adalah kebiasaan saya sebelum menjadi anggota DPRD pada waktu pagi hari adalah mempersiapkan barang dagang dan sekarang hal itu berubah menjadi mempersiapkan tugas-tugas kantor dan yang paling penting harus membaca koran, majalah dll atau nonton TV demi mengetahui perkembangan yang terjadi sekarang (wawancara, 13 November 2012).

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa terjadi proses transformasi pada gaya hidup dari pedagang menjadi gaya hidup pejabat atau politisi yang dimana lebih mementingkan informasi, pengembangan diri dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD Selain gaya hidup pedagang tersebut tentang cara berpakaian dan kebutuhan akan informasi namun terjadi pula pada kesadaran tentang akan pentingnya pendidikan Bentuk perubahan tersebut diungkapkan oleh AO bahwa :

terpilihnya saya menjadi wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Wajo mengharuskan saya untuk belajar dan sekarang saya berpikir untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Selanjutnya bagi saya pendidikan itu penting apalagi setiap hari kita dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan pemikiran yang baik contohnya saya mesti belajar dan memahami Undang-Undang. (wawancara, 12 November 2012)

Alasan lain juga dikemukakan oleh LH dan RS bahwa :

pendidikan adalah salah satu syarat utama yang mesti ada bagi anggota DPRD karcna tanpa pendidikan bagaimana kita bisa mengetahui kebijakan apa yang mesti dikeluarkan (wawancara, 6 dan 13 dan 14 November 2012)

Dari hasil wawancara dan pengamatan di atas dapat dilihat bahwa

kesadaran tentang pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anggota DPRD berbeda sebelum sewaktu menjadi pedagang. Sewaktu menjadi pedagang tidak terlalu mementingkan pendidikan karena orientasi hidup mereka hanya difokuskan untuk mencari kekayaan semata

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa bentuk transformasi yang terjadi pada pedagang Bugis Wajo adalah perubahan gaya hidup dari pedagang menjadi pejabat (anggota DPRD). Gaya hidup yang dimaksud adalah cara berpakaian, kebiasaan pada pagi hari dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

#### **b. Interaksi sosial**

Interaksi sosial merupakan suatu ciri manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. interaksi sosial berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok sosial yang lain

Bentuk transformasi sosial yang terjadi pada pedagang Bugis-Wajo setelah menjadi anggota DPRD adalah perubahan interaksi sosialnya. Perubahan interaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan interaksi pedagang dalam keluarga (isteri/suami dan anak-anak), Pedagang dengan kerabat dekat (diluar keluarga inti), pedagang dengan masyarakat dan pejabat (elit politik).

Seiring dengan perubahan status sosial pedagang yang meningkat cepat atau lambat tentu akan mengalami suatu perubahan. Hal ini disebabkan oleh

perubahan peran dalam masyarakat dan lingkungan bam yang mereka temui. Sebelum menjadi anggota DPRD pola hubungan interaksi pedagang Bugis-Wajo dengan keluarga (isteri/suami dan anak-anak) terjalin intensif dan akrab sebab rata-rata mereka berdagang di rumah sendiri maksudnya rumah mereka selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai toko (tempat untuk berjualan) jadi intensitas atau waktu untuk berinteraksi mereka cukup banyak atau sering. Bahkan mereka memiliki pola interaksi yang selayaknya teman kerja (pola interaksi atasan dan bawahan) maksudnya dalam mengelola usaha mereka biasanya bersama oleh keluarga (isteri/suami dan anak-anak) Berikut hasil wawancara, hal tersebut diungkapkan oleh AO bahwa :

Setelah saya menjadi anggota DPRD pertemuan saya dengan keluarga sangat kurang. Saya berhubungan dengan istri dan anak-anak pada saat malam atau pagi hari saja karena tugas-tugas dikantor sebagai anggota DPRD sangat banyak dan terkadang saya keluar daerah dalam beberapa hari. Makanya disaat libur saya memanfaatkan dengan liburan keluar daerah atau rekreasi. (wawancara 13 November 2012)

Setelah menjadi anggota DPRD pola interaksi pedagang dalam keluarga (isteri/suami dan anak-anak) terjadi perubahan. Menurut hasil pengamatan dan wawancara diatas secara umum interaksi yang mereka alami ketika menjadi anggota DPRD berkurang sebab pada waktu pagi yang biasanya mereka gunakan untuk berdiskusi atau berkumpul dengan keluarga (isteri/suami dan anak-anak) digunakan ke kantor, sehingga waktu untuk berinteraksi dengan keluarga di rumah hanya mereka dapati pada malam hari hingga Subuh dan pada saat libur kantor. Waktu libur pun biasanya mereka gunakan untuk istirahat dirubah dan sekali-kali

mereka gunakan rekreasi atau keluar kota

Sedangkan hubungan Pedagang dengan kerabat dekat (diluar keluarga inti), sebelum menjadi anggota DPRD hubungan dengan keluarga pada umumnya tetap sangat kuat dan terjadi intensif sebab dalam menjalankan kegiatan berdagang biasanya mereka merekrut karyawan dari keluarga atau kerabat dekat

Menurut hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan dalam penelitian ini adalah pola interaksi yang juga mengalami perubahan pada saat mereka sebagai pedagang adalah pola interaksi dengan kerabat-kerabat dekat biasanya hanya dilakukan pada saat ada pernikahan, kematian dan pada setiap hari raya keagamaan (lebaran). Salah satu bentuk interaksi yang paling jelas mengalami proses transformasi adalah pada saat lebaran. Pola interaksi berubah setelah menjadi anggota DPRD yang dimana lebih modern dan lebih formal. Pola interaksi yang dimaksud adalah tradisi saling mengunjungi (silaturahmi) yang biasa dilakukan pasca hari raya guna mempererat tali persaudaraan mengalami transformasi setelah menjadi anggota DPRD.

Perubahan bentuk interaksi pasca hari raya tidak lagi mengunjungi kerabat akan tetapi mereka hanya menunggu tamu dirumah atau meluangkan waktu khusus untuk menerima tamu Bentuk pola interaksi pasca hari raya (open house) tersebut mengikuti kebiasaan dan budaya pejabat. Hal tersebut dilakukan karena melihat banyaknya tamu yang datang untuk mengadakan silaturahmi baik dari unsur partai politik maupun dari keluarga atau pendukung mereka. Menurut hasil wawancara, hal tersebut diungkapkan oleh Andi Oddang SE bahwa :

bagi saya silaturahmi (saling mengunjungi) telah menjadi suatu tradisi turun temurun di keluarga saya. Kami biasanya melakukan silaturahmi kekerabat pada saat lebaran, hajatan (pesta), dan kematian. Berbeda dengan sekarang kami hanya menunggu di rumah atau biasanya kita open house. (wawancara 12 November 2012)

Perubahan pola interaksi yang juga jelas sekali terjadi pada pola interaksi dengan masyarakat dan para pejabat. Sebelum menjadi anggota DPRD bentuk interaksi yang dengan pejabat terjadi apabila mereka memiliki keperluan pada bidang perdagangan seperti mengurus surat izin usaha. Namun setelah menjadi anggota DPRD justru tiap harinya banyak berinteraksi dengan para pejabat dan tokoh masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan AM dan AS menyatakan:

Perubahan yang kami alami setelah menjadi anggota DPRD banyak terjadi pada interaksi dengan masyarakat (konstituen) dan pejabat-pejabat daerah berbeda pada saat berprofesi sebagai pedagang kita hanya ketika ingin mengeluarkan surat izin usaha dll. Sedangkan setelah menjadi anggota DPRD kita selalu berinteraksi dengan para pejabat selain itu lingkungan tempat bekerja (kantor) setiap saat kita berinteraksi dengan para kontraktor, wartawan, aktifis LSM, mahasiswa dll. (wawancara 13 dan 14 November 2012 )

Dari data yang diperoleh dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola interaksi yang mengalami banyak perubahan terletak pada bentuk interaksi dengan para pejabat publik dan masyarakat umum dari berbagai profesi seperti kontraktor, wartawan, aktifis LSM dan mahasiswa

### **c. Stratifikasi sosial**

Stratifikasi sosial (social stratification) adalah suatu lapisan yang ada pada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki stratifikasi sosial yang akan membedakan seseorang dengan yang lain sebab setiap masyarakat jelas memiliki bentuk

penghargaan yang berbeda-beda terhadap seseorang Sistem pelapisan sosial dapat terjadi dengan sendirinya dan juga dapat terjadi karena disengaja atau dengan melalui perjuangan dan pengorbanan Adapun dalam sistem stratifikasi sosial dapat dibedakan melalui bentuk-bentuknya seperti stratifikasi berdasarkan atas posisi ekonomi (kepemilikan harta/kekayaan), kedudukan (jabatan-jabatan penting dalam masyarakat) dan kecerdasan (tingkatan pendidikan)

Berdasarkan hasil pengamatan, kecenderungan pelapisan sosial di Kabupaten Wajo diperoleh dan diukur dari kedudukan dan kekayaan Bentuk stratifikasi pedagang pada posisi ekonomi dapat dilihat dari tingkat kekayaan atau kepemilikan harta mereka seperti kepemilikan rumah, perhiasan, mobil menjadi salah satu tolak ukur dalam masyarakat. Sedangkan pada lapisan yang didasarkan pada jabatan (kekuasaan) dapat dilihat pada kepemilikan jabatan seperti Lurah, Camat, Bupati, atau anggota DPRD

Perubahan status seseorang baik dari bawa ke lapisan atas tentunya mengalami suatu transformasi. Adapun bentuk transformasi yang dialami pedagang setelah menjadi anggota DPRD adalah mendapatkan kehormatan atau prestise dalam masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan AA menyatakan bahwa:

Salah satu perubahan yang saya alami sejak menjadi anggota DPRD adalah derajat atau kedudukan saya dimasyarakat terasa meningkat. Hal ini terbukti bahwa ketika saya turun dimasyarakat saya diberi penghargaan tersendiri dibanding sewaktu saya masih menjadi pedagang misalnya di acara hajatan saya selalu duduk didepan dan diberi pelayanan yang khusus.(wawancara, 12 November 2012)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan salah satu bentuk transformasi yang terjadi pada pedagang setelah menjadi anggota DPRD adalah stratifikasi sosial dalam bentuk mendapatkan kehormatan atau prestise yang melebihi pada waktu menjadi pedagang. Salah satu indikator yang utama dalam menentukan stratifikasi sosial seseorang dapat diukur dengan kepemilikan akan kedudukan atau prestise dalam masyarakat.

### **3. Faktor-faktor penyebab terjadinya transformasi sosio-kultural**

Pada dasarnya setiap manusia pasti akan mengalami suatu perubahan baik dalam individu maupun dalam suatu kelompok. Suatu perubahan dari satu kondisi (bentuk awal) ke kondisi yang lain (bentuk akhir) dalam suatu masyarakat merupakan suatu bentuk transformasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan fenomena pedagang Bugis Wajo menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo adalah merupakan suatu bentuk transformasi yang terjadi pada aspek sosial dan budaya. Bentuk perubahan yang terjadi adalah pada perubahan gaya hidup, interaksi sosial, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi sosio-kultural sebagai berikut:

#### **a. Lingkungan**

Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan dari luar masyarakat. Salah satu faktor penyebab perubahan dari luar masyarakat adalah lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan bam

seperti pada lingkungan pergaulan dan tempat kerja pedagang Bugis-Wajo Di lingkungan sosial yang baru pedagang tersebut pasti akan membawa suatu perubahan yang berupa nilai-nilai sosial, kebiasaan atau budaya baru.

Menurut hasil penelitian dan pengamatan bahwa fenomena pedagang Bugis Wajo menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo merupakan suatu perubahan yang disebabkan oleh lingkungan sosial misalnya di lingkungan sosial pedagang memiliki pola interaksi antara penjual dengan pembeli sedangkan pada tempat kerja pedagang berada di Ruko (rumah toko) atau pasar. Sedangkan setelah menjadi anggota DPRD lingkungan/tempat kerja beralih menjadi di kantor DPRD Berikut kutipan wawancara AM dan LH bahwa:

Perbedaan yang saya rasakan terjadi juga pada tempat kerja saya yang dimana dulunya saya berdagang di rumah sedangkan sekarang saya berkantor di DPRD Hal ini yang membuat saya mesti menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru saya.(wawancara, 12 November 2012)

Diketahui bahwa suatu masyarakat yang hidup di lingkungan yang baru mereka dapati maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan Penyesuaian diri pedagang tersebut berimplikasi terhadap terjadinya suatu transformasi pada aspek sosio-kultural.

Perbedaan setelah mereka menjadi anggota DPRD yang dapati adalah bentuk interaksi yang sering dilakukan seperti berinteraksi dengan para pejabat yang memiliki banyak kepentingan sedangkan sewaktu menjadi pedagang hanya berinteraksi dengan orang lain selayaknya pedagang dan pembeli Sehubungan dengan hal ini menurut AO dan AS menyatakan bahwa:

Ketika menjadi pedagang saya hanya berinteraksi dengan para pembeli dalam artian komunikasi saya hanya bersitat ekonomi sedangkan menjadi anggota legislatif kita berkomunikasi dengan para politisi baik dalam partai sendiri maupun dengan orang dari partai lain Disamping itu tempat kerja saya yang berubah di kantor DPRD membuat saya mesti menyesuaikan dengan teman-teman disini (wawancara, 12 November 2012 )

Dari kondisi yang digambarkan diatas menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada pedagang Bugis-Wajo tersebut merupakan suatu transformasi sosial dan yang menjadi penyebabnya adalah lingkungan baru mereka (tempat kerja)

#### **b. Pendapatan**

Pendapatan merupakan hal yang penting terhadap tingkat kemakmuran masyarakat karena memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Diketahui bahwa pendapatan seorang pedagang yang menjadi anggota DPRD berasal dari dua sumber yakni pertama dari pendapatan sebagai pedagang yang dijalankan oleh orang lain, kedua bersumber dari gaji mereka sebagai anggota DPRD Dari hasil wawancara dengan informan pedagang mengakui bahwa terjadi peningkatan pendapatan setelah menjadi anggota DPRD.

Berikut kutipan wawancara dengan, AS, dan AO menyatakan bahwa:

Setelah menjadi anggota DPRD pendapatan saya bertambah sebab selain gaji kita sebagai anggota DPRD juga usaha berjalan dengan bantuan keluarga. (wawancara12 - 15 November 2012)

Peningkatan pendapatan pedagang setelah menjadi anggota DPRD tersebut berimplikasi terhadap terjadinya transformasi sosio-kultural pada pedagang

Seiring dengan peningkatan pendapat sebagai anggota DPRD keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier dapat teratasi. Kebutuhan yang teratasi seperti kepemilikan barang mewah seperti kepemilikan kendaraan, barang elektronik seperti hand phone dan note book, rumah dan tanah. Hal tersebut berbeda sebelum menjadi anggota DPRD kebutuhan kepemilikan barang mewah disesuaikan dengan kebutuhan untuk berdagang. Hal ini menuait AM menyatakan bahwa:

Setelah menjadi anggota DPRD jelas mengalami peningkatan akan tetapi kebutuhan juga meningkat seperti kebutuhan memiliki mobil karena dalam tugas sebagai anggota DPRD yang terkadang mengharuskan kita mengadakan perjalanan jarak jauh selain itu jarak kantor dari rumah pribadi saya trnkup jauh. Berbeda disaat berprofesi sebagai pedagang kebutuhan untuk memiliki mobil dihanya untuk kebutuhan keluarga.(wawancara, 13 November 2012)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang mengisyaratkan tingkat kesejahteraan pedagang tersebut. Peningkatan pendapatan pedagang berimplikasi terhadap kepemilikan barang-barang mewah yang selanjutnya merubah gaya hidup seorang pedagang menjadi gaya hidup pejabat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab orientasi politik pedagang Bugis Wajo**

#### **a. Faktor Internal**

Fenomena tentang tingginya partisipasi politik pedagang Bugis Wajo menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo disebabkan oleh orientasi politik pedagang Bugis-Wajo. Orientasi politik pedagang yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah suatu tindakan atau aktifitas yang mempengaruhi kehidupan dan berpartisipasi seseorang terhadap sistem politik dan struktur politik yang ada seperti orientasi menjadi anggota DPRD.

Menurut hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan di lapangan adanya orientasi politik pedagang Bugis Wajo tersebut dipengaruhi beberapa faktor baik dari dalam diri pedagang maupun dari luar diri pedagang yang kemudian berimplikasi terhadap masuknya mereka dalam salah satu partai politik dan selanjutnya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada pemilihan umum yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali.

Adapun faktor penyebab dari dalam diri pedagang dapat dilihat dari watak orang Bugis Wajo yang masih bertahan sampai sekarang. Watak merupakan suatu yang ada dalam diri setiap manusia kemudian watak inilah yang menjadi suatu nilai budaya dan menjadi suatu pegangan (landasan) dalam setiap tindakan. Adapun watak dimaksud adalah keinginan untuk mencari kebebasan baik pada bidang perdagangan maupun dibidang politik. Watak yang ada dalam diri orang Bugis Wajo tersebut menjadi semakin kuat karena dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang juga masih ada sampai sekarang yakni "*Maradeka to Wajoe, najajiang alena maradeka, taniaemi ata, naia to makketenae maradeka maneng, ade assamatum.sentiemi napopuang*" (Orang Wajo merdeka, dan terlahir dalam kondisi sudah merdeka, hanya tanahlah yang menjadi abdi, setiap mereka yang hidup diatas tanah Wajo memiliki hak kemerdekaan, dan hanya adat turun-temurun yang telah disepakatilah yang dijadikan pengikat).

Nilai-nilai kultural orang Bugis Wajo yang menyangkut kebebasan tersebut menjadi suatu daya pendorong yang kuat dan dalam diri pedagang Bugis Wajo bahkan hal ini telah menjadi suatu identitas dan karakter orang Bugis Wajo baik dalam hal bebas mencari nafkah, bebas dari tekanan psikologi maupun bebas dalam hal menentukan pilihan politik dan keikutsertaan dalam kontestasi politik seperti menjadi anggota legislatif di Kabupaten Wajo. Bagi orang Bugis Wajo watak semangat kebebasan (*liberal spirite*) tersebut mengandung banyak makna tentang nilai-nilai hak asasi manusia seperti demokratisasi (kebebasan/maradeka) serta ketaatan pada hukum yang berlaku. Selain itu nilai budaya tersebut sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi dimana rakyat diberikan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis, hak untuk ikut aktif dan pasif dalam pemilihan umum.

Selain dari nilai kultural tentang kebebasan tersebut pedagang juga memegang suatu falsafah "Tiga S" yang juga dalam orientasi politik mereka memberikan dorongan yang kuat. Falsafah Tiga S" yakni *Sipakatati*, *Sipakalebbi* dan *Sipakainge* yang berarti saling menghargai, saling menghormati dan saling mengingatkan. Dalam falsafah ini mengandung arti bagaimana manusia saling mengingatkan. Mengingat (Sipakainge) dalam hal ini memberi pedagang memiliki orientasi politik karena ingin memberi saran dan masukan di dewan agar tercipta kesejahteraan untuk masyarakat Wajo atau menjadi menyambung aspirasi bagi masyarakat khususnya pedagang

Setiap manusia tentunya menginginkan suatu kesejahteraan dan keberhasilan dalam hidupnya. Keberhasilan pedagang dalam bidang politik bukan datang begitu saja namun keberhasilan mereka disebabkan oleh usaha dan perjuangan mereka untuk mencapai keinginan politiknya. Keinginan dan orientasi politik pedagang tersebut pada tinjauan usaha didasari oleh nilai-nilai kultural yakni "*resopa temmangingngi namalomo naletei pammasena dewata seuwae* " yang artinya hanya dengan kerja keras tak kenal lelah serta tak bosan yang mudah dilimpahi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dari nilai kultural tentang *reso* atau usaha diatas menunjukkan bahwa penyebab orientasi politik pedagang Bugis-Wajo tersebut juga dilatar belakangi adanya keinginan untuk berhasil yang didapat dari usaha dan kerja keras mereka sebab dengan kerja keras akan mendapat rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dari pemaparan tentang nilai-kultural yang menjadi faktor pendorong dari dalam diri pedagang dalam berorientasi politik dapat disimpulkan bahwa orientasi politik pedagang Bugis Wajo di latar belakangi oleh orientasi politik mereka untuk mendapatkan kebebasan serta keinginan untuk mengubah kondisi sosial dalam masyarakat lebih baik dengan jalan saling mengingatkan.

Selain nilai-nilai kultural penyebab orientasi politik pedagang Bugis-Wajo adalah motivasi sosial Motivasi sosial merupakan sesuatu yang berasal dari diri pribadi pedagang yang dapat menggerakkan mereka kemudian berimplikasi terhadap tindakan dan partisipasi mereka pada bidang politik Menurut hasil penelitian dan pengamatan di lapangan bahwa motivasi pedagang untuk

berorientasi politik adalah:

1. Mendapatkan kedudukan atau status sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Dalam hal ini pedagang memandang bahwa menjadi anggota DPRD dapat meningkatkan status sosial mereka dalam masyarakat. Sebab sekarang untuk mencapai derajat sosial dalam masyarakat Wajo bukan hanya dengan kekayaan akan tetapi kedudukan (kekuasaan) menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan, Keinginan untuk membangun Kabupaten Wajo. Dalam hal ini pedagang menganggap bahwa dengan menjadi anggota DPRD dapat mengaktualisasikan diri atau berkarya untuk membangun daerah sebab dengan menjadi anggota DPRD dapat penyambung aspirasi masyarakat khususnya dari kalangan pedagang.

2. Motivasi untuk menambah tingkat pendapatan.

Pedagang termotivasi dengan menjadi anggota DPRD dapat menambah pendapatan mereka sebagai pedagang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sehubungan beberapa motivasi pedagang tersebut sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh David C Mc Lelland dalam Adijah (2009:13) bahwa motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan Berikut ini ada tiga kategori motivasi sosial, yakni :

- a. Kebutuhan untuk berprestasi atau berkarya lebih baik (Need for Achievement)
- b. Kebutuhan untuk bersahabat atau berafiliasi ( Need for Affiliation)

c. Kebutuhan untuk berkuasa (Need for Power)

Selanjutnya tentang motivasi pedagang dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya dalam buku "The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism" karya Max Weber menjelaskan bahwa semangat kapitalisme adalah gagasan dan kebiasaan yang menunjang pengejaran keuntungan ekonomi secara rasional. Teori ini menyatakan bahwa seseorang hidup menurut pandangan dunia ini lebih besar kemungkinannya untuk mengakumulasi uang (pendapatan).

**b. Faktor eksternal**

faktor eksternal yang ada dari luar diri pedagang sendiri adalah pengaruh iklim politik tentang keterbukaan atau demokratisasi. Demokratisasi yang dimaksud adalah adanya kondisi perpolitikan secara nasional yang memberikan kebebasan kepada rakyat dalam hal berpolitik. Kondisi iklim politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang diktator menjadi Orde Reformasi yang memberi harapan terhadap kebebasan setiap individu maupun kelompok dalam hal partisipasi politik. Hal inilah yang dipandang oleh pedagang sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan status sosial mereka dengan cara ikut serta dalam pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Wajo

Adapun keikutsertaan pedagang Bugis Wajo tersebut di latar belakang oleh perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dijelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu pengaruh partai politik dalam hal ini juga merupakan faktor eksternal yang menyebabkan pedagang berorientasi politik. Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan; politik dan merebut kedudukan-kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Armin Arsyad2010: 2).

Tak terlepas dari tujuan partai politik tersebut dalam hal memperoleh kekuasaan sudah semestinya partai politik memperluas pengaruh dan dukungannya terhadap masyarakat agar dapat memenangkan pemilihan umum dan mendapat perwakilan baik di pemerintahan maupun legislatif agar dapat mengontrol kebijakan sesuai dengan apa yang mereka anggap benar dan dapat menjadi representatif dari keinginan dan aspirasi rakyat.

Melihat kondisi ini dalam pandangan pedagang bahwa untuk mencapai keinginannya menjadi anggota DPRD maka mereka hams menjadi anggota partai politik dan selanjutnya mencalonkan diri menjadi pada pemilihan umum Selain itu pada partai politik di Kabupaten Wajo menganggap bahwa pedagang merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh besar, popularitas dan

kekuatan finansial yang lebih Jadi secara tidak langsung mereka telah memenuhi variabel untuk mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat.

## **2. Bentuk transformasi sosio-kultural pedagang Bugis Wajo**

### **a. Gaya hidup**

Dengan adanya orientasi politik pedagang Bugis-Wajo menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wajo tentunya akan terjadi suatu proses transformasi pada sistem sosial dan budaya yang ada baik secara individu dan kelompok. Suatu perubahan dari satu kondisi (bentuk awal) ke kondisi yang lain (bentuk akhir) dalam suatu masyarakat merupakan suatu bentuk transformasi. Adapun bentuk transformasi yang terjadi pada gaya hidup, interaksi sosial, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Menurut hasil penelitian dan pengamatan tentang bentuk-bentuk transformasi sosio-kultural akibat orientasi politik pedagang Bugis Wajo terdapat pada gaya hidup atau life style pedagang Bugis Wajo seperti cara berpakaian, kebiasaan pedagang dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Cara berpakaian pedagang Bugis Wajo sebelum menjadi anggota DPRD masih menggunakan pakaian apa adanya dan sesuai dengan apa yang menjadi dagangannya seperti baju kaos namun setelah menjadi anggota DPRD bertransformasi menjadi penggunaan pakaian resmi, rapi dan sopan dalam melaksanakan kewajibannya dikantor. Hal ini disebabkan oleh tuntutan profesionalisme kerja sebagai anggota DPRD serta lingkungan tempat kerja mereka yang selalu berinteraksi dengan para elit politik. Selain itu gaya

hidup yang mengalami transformasi terjadi pada gaya hidup seperti penggunaan barang-barang mewah seperti perhiasan, mobil, rumah mewah serta kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting sebab tuntutan sebagai anggota DPRD mengharuskan mengetahui informasi baik secara lokal maupun secara global.

Selain itu transformasi yang terjadi pada gaya hidup juga terjadi pada perubahan pola pikir yang menganggap bahwa pentingnya akan pendidikan. Hal ini sangat berbeda saat mereka berprofesi menjadi pedagang yang orientasi hidupnya hanya arahkan pada persoalan mated atau mencari kekayaan semata sedangkan setelah menjadi anggota DPRD tuntutan akan pendidikan menjadi faktor utama sebab pekerjaan anggota DPRD yang selalu membutuhkan pemikiran yang matang. Sedangkan bentuk transformasi pada gaya hidup pedagang seperti kebiasaan bangun pagi untuk mempersiapkan barang dagangannya berubah setelah menjadi anggota DPRD dengan kebiasaan membaca koran demi menambah informasi yang kontemporer ataupun mempersiapkan kebutuhan untuk kantor atau tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab sebagai anggota DPRD

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perubahan status pedagang menjadi anggota DPRD mengalami proses transformasi pada kebiasaan mereka Hal ini disebabkan oleh kesibukan dan tugas yang menuntut adanya profesionalisme dalam pekerjaan

## **b. Interaksi sosial**

Sebagai makhluk sosial setiap manusia tentunya membutuhkan manusia lain dan untuk saling berhubungan mereka melakukan interaksi dengan manusia lain. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok (Sukanto 2003: 61) Perubahan status pedagang menjadi anggota DPRD tentu membawa perubahan baik pada gaya hidup dan lingkungan mereka Pada lingkungan baru pedagang tersebut tentunya juga memiliki bentuk dan pola interaksi yang berbeda dari sebelumnya. Bentuk interaksinya seperti interaksi pada keluarga, kerabat, dan masyarakat

Adapun interaksi sosial yang mengalami suatu perubahan adalah interaksi dalam keluarga berkurangnya atau intensitas pertemuan mereka dengan sebelumnya yang dimana pekerjaan sebagai pedagang banyak dilakukan dirumah jadi interaksi mereka dianggap cukup baik hal ini berbeda pada saat mereka menjadi anggota DPRD yang mengharuskan mereka berkantor dan terkadang memiliki kesibukan di luar daerah jadi intensitas pertemuan dan interaksi berkurang.

Hal ini berbeda pada pola interaksi pada masyarakat mengalami transformasi yang dimana seorang anggota DPRD harus menjaga kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya maka dari itu secara otomatis komunikasi mereka dijaga dan interaksi yang terjadi cukup intensif. Hal ini juga dapat dilihat bahwa pola interaksi pedagang memiliki sistem yang menyerupai jari laba-laba yang

berarti semakin luas dan banyak jaringan sosial maka semakin besar pula maka semakin gampang untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi

Selain itu adapun interaksi bentuk transformasi yang terjadi pada kerabat-kerabat dekat pasca hari raya (idul adha dan idul fitri) yakni saling mengunjungi (silaturahmi) Hal tersebut berbeda setelah menjadi anggota DPRD tradisi untuk silaturahmi dilakukan dengan cara menunggu tamu dirumah (open house).

Tradisi open house itu disebabkan karena melihat banyaknya tamu yang datang untuk mengadakan silaturahmi baik dari unsur partai politik maupun dari keluarga atau pendukung mereka Selain itu juga dilakukan silaturahmi masyarakat/pendukung mereka di daerah pemilihan mereka, hal ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga kepercayaan yang diberikan pada mereka ataupun sesekali bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Dari pembahasan hasil penelitian diatas hal ini menunjukkan bahwa bentuk transformasi yang terjadi pada pola interaksi pedagang seperti silaturahmi mengalami perubahan bentuk dari tradisional menjadi yang lebih modern atau mengikuti kebiasaan dan budaya lain seperti open house Sedangkan perubahan penggunaan bahasa dalam berinteraksi sehari-hari yang lebih berbentuk pragmatis yang mengikuti gaya bahasa politisi atau pejabat tersebut sesuai dengan teori interaksi simbolik yang memandang bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol,

### **c. Stratifikasi sosial**

Setiap masyarakat tentunya memiliki lapisan-lapisan sosial yang dapat dilihat berdasarkan atas kepemilikan kekayaan, jabatan, tingkat pendidikan dan kecerdasan. Sistem pelapisan dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dan ada juga terjadi secara disengaja seperti perubahan status yang terjadi pada pedagang menjadi anggota DPRD. Adapun bentuk transformasi yang terjadi pada pedagang menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo adalah stratifikasi mereka yang meningkat dalam masyarakat. Status pedagang tersebut mengalami gerak sosial vertikal atau dengan kata lain terjadi suatu mobilitas sosial ke lapisan atas. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan jabatan dan kekayaan mereka sebagai anggota DPRD. Selain itu tentu saja sebagai anggota DPRD mereka memiliki penghargaan dan penghormatan tersendiri dari masyarakat.

Dari perubahan status pedagang tersebut terjadi suatu transformasi sosio-kultural yang dimana sesuai dengan teori Max Weber tentang stratifikasi. Dalam konsepnya tentang stratifikasi Weber memfokuskan perhatiannya terhadap pengakuan terhadap status dalam masyarakat yang didasarkan atas kelompok penguasa (power group) dan kelompok yang dikuasai (non power group) yang berarti lapisan masyarakat diukur oleh kekuatan ekonomi dan kekuasaan dan kehormatan.

Selanjutnya menurut Pelras (2006:5) menyatakan bahwa ciri khas orang Bugis adalah berkarakter keras dan menjunjung tinggi kehormatan Selanjutnya Pelras menambahkan bahwa prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai

kedudukan sosial tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan tetap merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial kemasyarakatan mereka

Adapun konsep stratifikasi sosial pada orang Bugis-Wajo yakni: 1) *To Maparenla* yakni pemerintah, 2) *To Panrita* yakni ahli agama atau tokoh spritual, 3) *Tan Accci* yakni cendikiawan atau orang pintar, 4) *Tau Sugi mapanre na saniasa* yakni orang kaya, pengusaha yang terampil dan cekatan, 5) *Tau Warani mapata'e* yakni orang pemberani atau pahlawan yang selalu waspada

### **3. Faktor penyebab transformasi sosio-kultural pedagang Bugis Wajo**

#### **a. Lingkungan**

Dalam pembahasan tentang bentuk transformasi sosio-kultural yang terjadi pada pedagang Bugis-Wajo disebabkan oleh faktor lingkungan sosial. Diketahui bahwa setiap manusia akan mengalami suatu perubahan apabila mendapatkan lingkungan sosial yang baru. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan tempat-tempat dimana mereka berinteraksi

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perubahan lingkungan pedagang menyebabkan proses transformasi sosio-kultural dari sebelumnya lingkungan tempat mereka kerja berada dirumah sendiri atau menggunakan rumahnya sebagai tempat mencari nafkah (tempat berdagang/Ruko) setelah menjadi anggota DPRD lingkungan tempat kerja mereka berada di kantor. Hal inilah yang membawa perubahan baik pada proses interaksi dan gaya hidup mereka

Pola interaksi mereka sebelum menjadi anggota DPRD antara pedagang dan pembeli sedangkan pada lingkungan baru pedagang mesti melakukan penyesuaian diri terhadap keadaan seperti interaksi dengan para pejabat dan masyarakat umum yang memiliki berbagai kepentingan (partai politik, aktifis LSM, mahasiswa). Penyesuaian diri pedagang terhadap perubahan lingkungan tempat mereka bekerja mengharuskan meninggalkan kebiasaan dan budaya sebelum menjadi anggota DPRD seperti gaya bahasa pedagang berubah menjadi lebih formal dan resmi.

#### **b. Pendapatan**

Adapun faktor penyebab transformasi sosio-kultural yang terjadi akibat pendapatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan pendapatan yang diperoleh pedagang dalam bentuk materil menyebabkan perubahan bentuk gaya hidup dan stratifikasi mereka dalam masyarakat. Diketahui bahwa pendapatan pedagang yang menjadi anggota DPRD berasal dari dua sumber yakni pertama dari pendapatan sebagai pedagang, usaha yang dijalankan, kediia bersumber dari gaji mereka sebagai anggota DPRD.

Peningkatan pendapatan berimplikasi pada gaya hidup pedagang yang sebelumnya tidak terlalu mementingkan mode berubah menjadi cara berpakaian resmi seperti menggunakan pakaian safari, kemeja atau batik Selain itu peningkatan pendapatan juga membentuk gaya hidup baru yang kebutuhannya pada penggunaan barang-barang mewah (mobil, rumah,

perhiasan, barang elektronik) Perubahan gaya hidup dari pedagang menjadi pejabat yang tersebut relevan dengan teori Max Weber tentang lapisan masyarakat berdasarkan ekonomi seperti kepemilikan atas barang mewah.

Dari penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa orientasi politik pedagang Bugis-Wajo menjadi anggota DPRD berimplikasi terhadap transformasi sosio kultural. Hal tersebut di latar belakang oleh perubahan pola pikir bahwa kepemilikan harta dan kedudukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, serta dihubungkan dengan perumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal pokok yang berkaitan dengan transformasi sosio-kultural pedagang Bugis-Wajo adalah :

1. Faktor penyebab orientasi politik pedagang Bugis-Wajo terdiri dari faktor internal a) watak orang Bugis Wajo yang selalu menginginkan kebebasan dan hal tersebut diperkuat oleh nilai-nilai budaya untuk saling mengingatkan dan berusaha/kerja keras, b) motivasi sosial mereka seperti keinginan meningkatkan status sosial mereka, keinginan untuk membangun daerah dan sebagai penyambung aspirasi masyarakat khususnya pedagang serta meningkatkan pendapatan. Sedangkan faktor eksternal seperti perubahan iklim politik menjadi lebih terbuka atau demokratisasi dan pengaruh partai politik di kabupaten Wajo.
2. Bentuk transformasi sosio-kultural yang terjadi sebagai akibat dari orientasi politik pedagang Bugis-Wajo adalah pada gaya hidup, interaksi sosial, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Perubahan Gaya hidup menyangkut cara berpakaian yang lebih mementingkan kewibawaan serta kepemilikan barang-barang mewah, interaksi dengan keluarga dan kerabat berkurang dan lebih banyak dengan masyarakat dan perubahan bahasa yang lebih bersifat

politis Perubahan pada stratifikasi sosial yang meningkat dari rendah ke stratifikasi tinggi.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi sosio kultural pada pedagang Bugis-Wajo yaitu lingkungan pergaulan/tempat kerja yang berbeda menjadikan pedagang hams merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru demi menyesuaikan dengan keadaan. Peningkatan pendapatan berpengaruh langsung pada perubahan kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan perubahan kebutuhan menjadi kepemilikan barang-barang mewah serta meningkatnya stratifikasi sosial dalam masyarakat dari rendah ke tingkat lebih tinggi

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

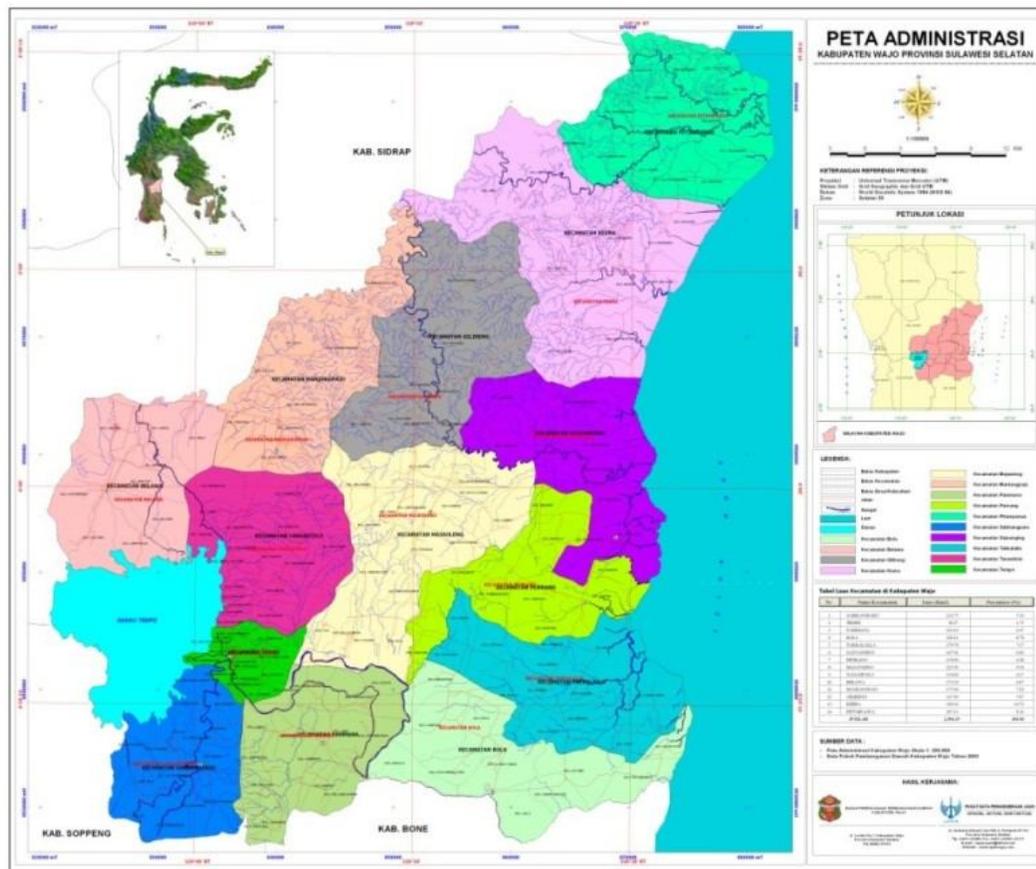
1. Disarankan kepada partai politik (Parpol) yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perekrut (pengkader) serta pemberi pendidikan politik pada masyarakat tetap berlandaskan pada nilai-nilai kultural demi terwujudnya pemerintahan demokratis di Kabupaten Wajo.
2. Disarankan kepada pedagang Bugis-Wajo yang memiliki orientasi politik agar tetap memelihara nilai-nilai kultural dan berpegang teguh pada falsafah hidup orang Bugis-Wajo.
3. Disarankan kepada peneliti ilmu-ilmu sosial untuk melanjutkan penelitian ini dan dapat memfokuskan perhatian kepada dampak yang akan terjadinya orientasi politik pedagang terhadap pedagang Bugis-Wajo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Abdulsyani, 2002 *Sosiologi (Skenialika, teori dan lerapan)*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Agustang, Andi. 2007. *Eilosofi Research*. Makassar; CV Indobis Publisher
- Ahmadin. 2008. *Kapitalisme Bugis (Aspek Sosio-Kiiltural dalam Etika Bisnis Orang Bugis Wajo)*. Makassar Pustaka Refleksi
- Arifin, Indar. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*. Makassar; Pustaka Refleksi
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 *Hasil Sensus Penduduk*. Jakarta BPS
- \Gatara, A.A Sahid dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung; Pustaka Setia.
- Giddens. Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modem (Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber)*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Kesuma, A. Ima. 2004. *Migrasi dan Orang Bugis*. Yogyakarta, Ombak.
- Lauer, Adam dan Jessica-Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Maharudin. 2005. *Psikologi Sosial*. Makassar. Makalah tidak diterbitkan. Makkuradde
- A. Syahrir. 2008. *Kinerja Wakil Rakyat (Kiprah DPRD Kabupaten Wajo 2004-2009)*.Makassar. Yayasan Sipakarennu Nusantara kerjasama dengan sekretariat DPRD Kab. Wajo
- Maran Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

# LAMPIRAN I

## Peta Kabupaten Wajo



Sumber: zonaprimatif.wordpress.com, diakses tanggal 29 Juli 2013

## LAMPIRAN II

### Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Kantor DPRD Kabupaten Wajo



Gambar 2. Struktur organisasi DPRD Kabupaten Wajo



Gambar 2. Wawancara informan Bapak Baso Oddang, SE



Gambar 3. Wawancara informan Bapak Andi Alamsyah



Gambar 3. Wawancara informan Ibu Andi Sriagustina Palaguna, SH

LAMPIRAN III

**PEDOMAN WAWANCARA**

**FENOMENOLOGI SAUDAGAR KE POLITISI**

**(Studi Riwayat Hidup Anggota DPRD Kab. Wajo)**

**PENDAHULUAN**

A. Identitas

- 1. Nama :
- 2. Usia :
- 3. Pekerjaan Sebelumnya :
- 4. Pendidikan :

**PERTANYAAN**

B. Motif Pedagang Bugis Wajo Beralih Menjadi Politisi

- a. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

.....  
.....  
.....

b. Kenapa Bapak/Ibu ingin menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah?

.....  
.....  
.....

c. Faktor pendorong sehingga Bapak/Ibu ingin menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

.....  
.....  
.....

d. Siapa yang mengajak Bapak/Ibu mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

.....  
.....  
.....

e. Nilai-nilai kultural apa yang Bapak/Ibu pegang dan dijadikan pandangan hidup?

.....  
.....  
.....

f. Apakah ada hambatan yang Bapak/Ibu alami pada saat ingin menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

.....  
.....  
.....

C. Bentuk perubahan sosial yang terjadi setelah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Apakah perbedaan yang Bapak/Ibu alami setelah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

.....  
.....  
.....

b. Apakah ada kebiasaan Bapak/Ibu yang berubah setelah menjadi Anggota DPRD?

.....  
.....  
.....

c. Apakah setelah menjadi Bapak/Ibu menjadi Anggota DPRD masih saling mengunjungi baik kerabat, atau masyarakat?

.....  
.....  
.....

d. Apakah pekerjaan sebagai Anggota DPRD mempengaruhi tingkat pendapatan Bapak/Ibu?

.....  
.....  
.....

e. Jika Bapak/Ibu menghadiri suatu acara pesta, bagaimanakah sambutan dari pelaksana dan orang yang hadir di acara tersebut?

.....  
.....  
.....

f. Apakah Bapak/Ibu sudah puas dalam pekerjaan yang sekarang, atau dalam kata lain lebih senang menjadi Anggota DPRD atau menjadi seorang pedagang?

.....  
.....  
.....

LAMPIRAN IV

**IDENTITAS INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>USIA</b>	<b>PEKERJAAN SEBELUMNYA</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	ANDI SRIAGUSTIANA PALAGUNA, SH	47	WIRASWASTA	STRATA 1
2	ANDI ALAMSYAH	44	WIRASWASTA	SMA
3	LUQMAN HAMID	43	PIMPINAN TOKO MENTARI	STRATA 1
4	BASO ODDANG, SE	36	WIRASWASTA	STRATA 1
5	H. AMINUDDIN	43	WIRASWASTA	SLTA
6	H. RUSMAN LUKMAN	39	PENGUSAHA	STRATA 2

## **BIODATA PENULIS**



**Muhammad Neldy Suradin.** Lahir di Sengkang, 29 Oktober 1986.

Seorang yang akrab dipanggil Neldy ini kuliah di Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Angkatan 2008. Neldy tinggal di BTN Mangga 3 Block D22/No.3.

Email: [neldysuradin@gmail.com](mailto:neldysuradin@gmail.com) atau [naokioneil@yahoo.com.au](mailto:naokioneil@yahoo.com.au). Anak dari pasangan

Drs.Alimuddin MS.i dan Hj.Suriyati Sp.d, ini menempuh pendidikan dasar di SD Negeri

2 Sengkang, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Sengkang dan pendidikan

menengah akhir di SMA Negeri 2 Sengkang. Nomor Hp: 082347280448

## PROFIL ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO

Nama : H. RISMAN LUKMAN, S.P., M. Si.  
Tempat Lahir : TEMPE  
Tanggal Lahir : 23 FEBRUARI 1972  
Alamat : JL. WR. SUPRATMAN No. 17 SENGKANG  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Status Perkawinan : KAWIN  
Nama Istri : Hj. ANDI NURLIANI, S.P.  
Nama Anak : 1. -  
2. -  
Riwayat Pendidikan : 1. TK BAHARUDDIN TEMPE Tahun 1979  
2. SDN No. 19 TEMPE Tahun 1985  
3. SMP NEGERI 1 TEMPE Tahun 1988  
4. SMA NEGERI 1 SENGKANG Tahun 1991  
5. SM .....  
6. S.1 UMI / FAKULTAS PERTANIAN Tahun 1995  
7. S.2 STIA PRIMA/ADM PEMERINTAHAN Tahun 2006  
Pengalaman Pekerjaan : 1. PENGUSAHA ANGKUTAN  
2. ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Pengalaman Organisasi : 1. SEKRETARIS BEM FAKULTAS PERTANIAN UNHAS TAHUN 1993  
2. KETUA GERAKAN PEMUDA KABAH TAHUN 2002  
3. SEKRETARIS DPC PPP KAB. WAJO TAHUN 2003 S.D. 2007  
4. KETUA DPC PPP KAB. WAJO TAHUN 2008 S.D. SEKARANG  
Tanda Penghargaan : -

---

Nama : LUKMAN HAMID, S.S.  
Tempat Lahir : SENGKANG  
Tanggal Lahir : 17 APRIL 1969  
Alamat : JL.LATENRI LAIT TOSENGGENG NO. 56 SENGKANG  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Status Perkawinan : KAWIN  
Nama Istri : VERAWATI JAMALUDDIN  
Nama Anak : 1. FAKHRUL RIJAL LUQVI  
2. FAKHRUN NISAA LUQVI  
3. LATHIFA FARADIBAH LUQVI  
4. AZQIYAH KHUMAIRAH LUQVI  
5. -  
Riwayat Pendidikan : 1. TK AISIYAH TEDDAOPU Tahun 1975  
2. SD MUHAMMADIYAH SENGKANG Tahun 1982  
3. SMP NEGERI 1 SENGKANG Tahun 1985  
4. SMA NEGERI 1 SENGKANG Tahun 1988  
5. SM - Tahun -  
6. S.1 UNHAS Tahun 1993  
7. S.2 - Tahun -  
Pengalaman Pekerjaan : 1. PIMPINAN TOKO MENTARI  
2. DIREKTUR PT. WAJO ENERGI JAYA  
Pengalaman Organisasi : 1. KETUA PD IPM KAB. WAJO  
2. KETUA PEMUDA MUHAMMADIYAHKAB. WAJO  
3. KETUA MAJELIS EKONOMI PDM KAB. WAJO

4. WAKIL KETUA DPD KNPI KAB. WAJO  
5. SEKRETARIS UMUM KAHMI KAB. WAJO  
Tanda Penghargaan : -

---

Nama : BASO ODDANG, SE.  
Tempat Lahir : PENEKI  
Tanggal Lahir : 3 AGUSTUS 1976  
Alamat : JL. LAPAWENNARI BLOK A/9  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Status Perkawinan : KAWIN  
Nama Istri : ANDI SHERLY SYAM, SE.  
Nama Anak : 1. ANDI DELFI MAHARANI  
2. ANDI DILFA RATU DELWANI  
3. -  
4. -  
5. -  
Riwayat Pendidikan : 1. TK AS'ADIYAH NO. 20 Tahun 1983  
2. SDN No. 228 PENEKI Tahun 1985  
3. SMP NEGERI 1 PENEKI Tahun 1991  
4. SMEA NEGERI 1 SENKANG Tahun 1994  
5. SM - Tahun -  
6. S.1 UMI MAKASSAR Tahun 1999  
7. S.2 - Tahun -  
Pengalaman Pekerjaan : 1. WIRASWASTA  
2. ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO

Pengalaman Organisasi :

Tanda Penghargaan :

---

Nama : ANDI ALAMSYAH  
Tempat Lahir : PINRANG  
Tanggal Lahir : 22 JULI 1968  
Alamat : BTN BULU PABBULU BLOK B1 NO. 7 SENKANG  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Status Perkawinan : KAWIN  
Nama Istri : SYAMSUL HUDA  
Nama Anak : 1. ANDI MUH. FADEL  
2. ANDI FARADIBA  
3. -  
4. -  
5. -  
Riwayat Pendidikan : 1. TK - Tahun -  
2. SDN No. 3 SENKANG Tahun 1981  
3. SMP NEGERI 1 SENKANG Tahun 1984  
4. SMA NEGERI 1 SENKANG Tahun 1987  
5. SM - Tahun -  
6. S.1 - Tahun 1999  
7. S.2 - Tahun -  
Pengalaman Pekerjaan : 1. WIRASWASTA  
2. ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO

Pengalaman Organisasi : -  
Tanda Penghargaan : -

---

Nama : ANDI SRI AGUSTINA PALAGUNA  
Tempat Lahir : UJUNG PANDANG  
Tanggal Lahir : 11 AGUSTUS 1965  
Alamat : JL. SULAWESI NO. 13 SENGKANG  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Status Perkawinan : KAWIN  
Nama Suami : -  
Nama Anak : 1. -  
2. -  
3. -  
4. -  
5. -  
Riwayat Pendidikan : 1. TK - Tahun -  
2. SDN - Tahun -  
3. SMP - Tahun -  
4. SMA - Tahun -  
5. SM - Tahun -  
6. S.1 - Tahun 1999  
7. S.2 - Tahun -  
Pengalaman Pekerjaan : 1. WIRASWASTA  
2. ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO

Pengalaman Organisasi : -

Tanda Penghargaan : -

---

Nama : H. AMINUDDIN  
Tempat Lahir : SENGKANG  
Tanggal Lahir : 7 MEI 1969  
Alamat : BTN LAPESONGKO II PERMAI SENGKANG  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO  
Status Perkawinan : KAWIN  
Nama Istri : Hj. INDO TANG  
Nama Anak : 1. ERWIN  
2. WINDA  
3. MUH. KHAI DIR  
Riwayat Pendidikan : 1. TK - Tahun -  
2. SDN Tahun -  
3. SMP Tahun -  
4. SMA Tahun -  
5. SM - Tahun -  
6. S.1 - Tahun 1999  
7. S.2 - Tahun -  
Pengalaman Pekerjaan : 1. WIRASWASTA  
2. ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO

Pengalaman Organisasi : -

Tanda Penghargaan : -

